PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH. AKBAR AMIN

NIM: 10800113173

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Akbar Amin

NIM : 10800113173

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 21 Juni 1995

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam

Alamat : Jln. Tamangapa Raya, Perumahan Grand Aroepala Makassar

Judul : Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender Sebagai

Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Makassar Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

MAKASSAR

Makassar, Februari 2020

Penyusun

Muh. Akbar Amin 10800113173



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)" yang disusun oleh Muh. Akbar Amin, NIM: 10800113173, mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Februari 2020 M, bertepatan dengan 3 Rajab 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

> Makassar, 3 Maret 2020 M. 8 Rajab 14/17 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua

: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

Sekretaris

: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Sj., Ak

Munagisy I

: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Munagisy II

: Memen Suwandi, SE., M.Si

Pembimbing I : Jamaluddin M, SE., M.Si

Pembimbing II: Andi Wawo, SE., M.Sc., Ak

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makasar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, zat yang menurunkan Al-Qur'an, yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul "Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)" Penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skipsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda H. Muh. Amin dan Ibunda

Hj. Nurbaya yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

- Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
- Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I,
 II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- 3. Bapak Memen Suwandi S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si. Ak. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
- 4. Bapak Jamaluddin M., S.E., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Wawo, S.E. M.Sc., Ak. Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
- 5. Bapak Dr. Muhammad Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si. Ak selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat.
- 6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
- Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.

8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. Rekan-rekan seperjuanganku Akuntansi UINAM angkatan 2013 terkhusus untuk Akuntansi D, terimakasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini serta telah menjadi teman yang hebat bagi penulis

10. Seluruh mahasiswa jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar, Kakak-kakak maupun adik-adik, terimakasih atas bantuan dan persaudaraannya.

11. Semua keluarga, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Amin Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah SWT adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis

Muh. Akbar Amin 10800113173

DAFTAR ISI

JUDUL PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR vii ABSTRAK viii BABI : PENDAHULUAN 1-21 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 8 C. Hipotesis 8 D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 12 E. Penelitian Terdahulu 15 F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 19 A. Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory)..... 22 B. Technology Acceptance Model (TAM) 23 C. Pajak dalam Perspektif Islam 24 D. Faktur Pajak dan E-Faktur 30 E. Surat Pemberitahuan (SPT) dan E-SPT 38 F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 40 G. Pengusaha Kena Pajak 43 H. Gender 44

I. Kerangka Pikir

45

BAB III:	METODE PENELITIAN	47-55
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	. 47
	B. Pendekatan Penelitian	. 47
	C. Populasi dan Sampel	47
	D. Jenis dan Sumber Data	. 49
	E. Metode Pengumpulan Data	49
	F. Instrumen Penelitian	. 50
	G. Metode Analisis Data	50
BAB IV:	HASIL DAN PEMBAHASAN	56-91
	A. Gambaran Umum KPP Makassar Selatan	. 56
	B. Gambaran Responden	. 62
	C. Uji Kualitas Data	69
	D. Uji Asumsi Klasik	. 71
	E. Uji Hipotesis	. 77
	F. Pembahasan Penelitian	. 83
BAB V:	PENUTUP	92-94
	A. Kesimpulan	. 92
	B. Keterbatasan Penelitian	93
	C. Saran	93
DAFTAR	PUSTAKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
LAMPIR	ALAUDDIN	
	MAKASSAR	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak Tahun 2016 – 2018	15				
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu	15				
Tabel 4.1 : Presentasi Wilayah, Kelurahan, Penduduk dan Kepala Keluarga					
Tabel 4.2 : Data Distribusi Kuesioner	62				
Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63				
Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	63				
Tabel 4.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64				
Tabel 4.6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Masa	65				
Tabel 4.7 : Statistik Deskriptif	65				
Tabel 4.8 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel E-Faktur	66				
Tabel 4.9 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel E-SPT	67				
Tabel 4.10 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	68				
Tabel 4.11 : Deskripsi Item Variabel Gender	69				
Tabel 4.12 : Hasil Uji Validitas	70				
Tabel 4.13 : Hasil Uji Reliabilitas	71				
Tabel 4.14 : Hasil Uji Normalitas-One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	72				
Tabel 4.15 : Hasil Uji Multikolinearitas	74				
Tabel 4.16: Hasil Uji Heteroskedastisitas - Uji Glejser	76				
Tabel 4.17 : Hasil Uji Autokorelasi	77				
Tabel 4.18 : Hasil Uji Koefisien Determinasi	77				
Tabel 4.19 : Hasil Uji F - Uji Simultan A S A R	78				
Tabel 4.20 : Hasil Uji T - Uji Parsial	79				
Tabel 4.21 : Hasil Uji Koefisien	81				
Tabel 4.22 : Uji F - Uji Simultan	81				
Tabel 4.23 : Hasil Uji t - Uji Parsial	82				
Tabel 4.24 : Akumulasi Hasil Pengujian Hipotesis	83				

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir	45
Gambar 4.1 : Hasil Uji Normalitas – Grafik Normal Plot	73
Gambar 4.2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas - Grafik Scatterplot	75



ABSTRAK

Nama: Muh. Akbar Amin

Nim : 10800113173

Judul : Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Selatan)

Penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan E-Faktur dan E-SPT terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* atau pengambilan sampel mudah. Sampel pada penelitian adalah Pengusaha Kena Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, adapun jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 87 Pengusaha Kena pajak.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh menggunakan metode survei yaitu penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis E-Faktur dan E-SPT. Analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi untuk hipotesis E-Faktur dan E-SPT yang dimoderasi oleh Gender.

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa E-Faktur dan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Sedangkan hasil analisis menggunakan regresi dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa gender mampu memperkuat hubungan E-Faktur dan E-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

Kata kunci: E-Faktur, E-SPT, Gender dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang (bukan barang) berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2016 : 3). Upaya pencapaian target pendapatan negara dalam hal ini lembaga yang ditunjuk yaitu Direktorat Jenderal pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP). Pajak yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat yaitu pajak pertambahan nilai (PPN). PPN dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Masyarakat yang mengonsumsi barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, maka secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara, karena PPN sudah termasuk dalam harga pembelian barang tersebut (Ferdiawan dkk, 2015).

Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan senantiasa dapat mengalami peningkatan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal (Suhartanto & Morasa, 2015). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنَهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيدً هَا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. 02: 267)

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT telah menganjurkan menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang telah diperoleh. Menafkahkan dalam hal kehidupan sosial atau bernegara sebagai mana warga negara yang mengeluarkan sebagian hartanya dengan membayar pajak dari hasil usaha yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat luas dan negara. Menurut Kader dkk (2015), Target penerimaan pajak dapat tercapai, apabila didukung oleh fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran pajak oleh wajib pajak dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Suhartanto & Morasa (2015), Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT

Tahunan atau mengalami keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan disebabkan antara lain, pertama kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan, kedua masih kurangnya sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak tentang SPT Tahunan, ketiga jarak wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang mungkin berjauhan dengan Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Sementara itu, pelaporan SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi cukup besar, karena harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus (Aryani, 2017). Hal ini menyebabkan target penerimaan pajak mengalami kendala dalam pencapaian target.

Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga mengakibatkan kerugian negara (Angraini dkk., 2017). Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Komala dkk, 2014). Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang

bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui modernisasi pembenahan sistem administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya oleh masyarakat. Salah satu bentuk dari hasil reformasi perpajakan yaitu sistem yang berbasis elektronik, seperti e-*registration*, e-SPT, dan sistem berbasis elektronik lainnya (Fida & Widyaningsih, 2017).

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan perpajakan salah satunya dengan dikembangkannya pelaporan pajak dengan menggunakan elektronik pajak seperti e-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak). Penerapan e-SPT tidak terlepas dari berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan e-SPT dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi (Sari dkk, 2014). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Napitupulu, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2017) menyimpulkan bahwa adanya e-SPT, pelaporan SPT-Masa PPN menjadi lebih cepat, akurat serta dapat menghemat biaya dan waktu. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi e-SPT ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumendokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Sistem mutu dan layanan kualitas menjadi faktor penting yang mempengaruhi pengguna untuk menggunakan sistem layanan perpajakan online seperti e-filling, e-SPT. Kualitas tersebut meliputi aspek visibilitas dan keamanan pengguna (Andriani dkk., 2017). Persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak (Setyonugroho dan Sardjono, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Sondakh (2017b), menemukan bahwa, persepsi kemudahan memiliki efek positif pada kegunaan dan sikap yang dirasakan pengguna e-SPT. Wajib pajak memiliki persepsi yang baik tentang kegunaan dan kemudahan penerapan teknologi informasi, mereka akan menunjukkan sikap positif dan tertarik dalam memanfaatkan teknologi informasi (Sondakh, 2017a). Sistem elektronik dalam bentuk aplikasi e-billing, e-filling dan e-SPT yang memiliki kejelasan dalam penggunaannya, mudah dipelajari dan dioperasikan, meningkatkan keterampilan pengguna dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan (Sa'adah dkk., 2018). Kepuasan mencerminkan bahwa pembayar pajak penghasilan puas dengan layanan elektronik dan sadar akan pengunaan situs web (Kumar dan Gupta, 2017).

Pada 1 Juli 2014 DJP meluncurkan sistem bernama e-Faktur, yaitu faktur pajak berbasis elektronik. E-Faktur diberlakukan secara bertahap, pada 1 Juli 2014 3-faktur diberlakukan untuk 45 perusahaan yang telah ditentukan oleh DJP, sebagai *pilot project*. Pada 1 Juli 2015, e-Faktur diberlakukan dan diwajibkan bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di wilayah pulau Jawa dan Bali. Pada 1 Juli 2016, e-Faktur diberlakukan dan diwajibkan bagi seluruh PKP yang terdaftar di

seluruh wilayah Nusantara (Fida & Widyaningsih, 2017). Sistem e-Faktur Pajak atau pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemudahan PKP dalam melaporkan pajaknya, juga untuk menghindari potensi kecurangan dalam pelaporan pajak yang ditanggungnya dan juga sebagai langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan yang telah dicanangkan (Yasa, 2016). Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan (Alfioreta dkk., 2016).

Banyaknya kasus faktur pajak fiktif menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu dengan penerapan aplikasi e-Faktur. Dengan adanya aplikasi e-Faktur banyak memberikan kemudahan dalam penggunaannya, tidak hanya bagi aparatur pajak namun juga bagi PKP sendiri. E-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi penggunaan kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Modernisasi elektonik faktur (e-faktur) Pajak Pertambahan Nilai diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Andrayuga dkk, 2017).

Menurut Mustapha dan Obid (2015), ada hubungan positif yang signifikan antara kualitas layanan pajak dan sistem pajak *online*. Hubungan antara kualitas layanan pajak dan persepsi kemudahan penggunaan juga signifikan secara statistik dengan nilai 0,93 dan kemudahan yang dirasakan penggunaan memiliki statistik

positif dengan sistem pajak *online* pada nilai signifikan 0.61. Implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa dengan memberikan layanan pajak yang berkualitas kepada wajib pajak dan kemudahan penggunaan sistem telah menyebabkan peningkatan dalam menghasilkan pendapatan dengan efek yang jelas pada perekonomian. Menurut Azmi dan Bee (2010), mengurangi persepsi wajib pajak tentang risiko dalam e-filing tidak hanya akan meningkatkan persepsi mereka tentang kegunaan e-filing tetapi juga mengarahkan mereka untuk mengadopsi sistem tersebut. Dengan demikian, mengeksplorasi lebih jauh risiko yang dirasakan akan meningkatkan pengetahuan kita tentang faktor-faktor yang sangat penting untuk penerapan layanan e-government.

Studi yang dilakukan oleh Hakim (2016) untuk menganalisis model penerimaan pengguna yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan e-SPT dan e-Filing menyimpulkan bahwa adanya perbedaan model penerimaan antara masing-masing kelompok jenis kelamin. Hal ini disebabakan karena, pria pada umumnya lebih berorientasi tugas (task oriented) dibanding wanita, sehingga tingkat kemanfaatan dan penyelesaian tugas relatif lebih kuat daripada wanita. Sedangkan wanita kemungkinan lebih berorientasi proses (process oriented) sehingga usaha yang dikeluarkan untuk mempelajari sesuatu memiliki efek yang lebih kuat dibanding pria. Menurut Ningrum dkk (2018), keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dan direksi (gender) dapat memperkuat pengaruh corporate social responsibility (CSR) dengan tax avoidance.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dikaji lebih lanjut dalam kegiatan penelitian skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

- 1. Apakah ada pengaruh penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
- 2. Apakah ada pengaruh penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
- 3. Apakah Gender dapat memoderasi pengaruh penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
- 4. Apakah Gender dapat memoderasi pengaruh penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?

C. Hipotesis

 Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Sarah & Sandra, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2017) bahwa penerapan

sistem e-Faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pembayaran pajak SPT Masa. Sejalan dengan penelitian Husnurrosyidah & Suhadi (2017) bahwa e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Adanya e-Faktur selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, e-faktur juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif. Begitu pula dengan hasil penelitian Alfioreta dkk (2016) bahwa penerapan sistem e-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

H₁: Penerapan E-Faktur Berp<mark>engaruh</mark> Positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

2. Pengaruh Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer (Diana dan Setawati, 2004: 9). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lingga (2012a) bahwa ada pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak: survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama "X". Sejalan dengan hasil penelitian Falerian R.A Tamboto (2013) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN

berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan (Lingga, 2012b).

Persepsi kegunaan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem *e-Filing* dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini karena seseorang akan menggunakan *e-filing* apabila orang tersebut mempercayai bahwa *e-filing* dapat memberikan manfaat dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Oleh karena itu, tingkat persepsi kegunaan *e-filing* mempengaruhi para Wajib Pajak untuk menggunakan *e-filing* tersebut (Nensi, 2017).

H₂: Penerapan E-SPT Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

3. Pengaruh Gender dalam Memoderasi Penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Bentuk E-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. E-Faktur tidak diwajibkan dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*) sehingga mengurangi penggunaan kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan (Sarah & Sandra, 2016).

Berdasarkan Coate & Frey (2000 dalam Dharma 2016), terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan kebutuhan peran lainnya. Dalam hal menyikapi suatu perilaku penggelapan pajak maka laki-laki dan perempuan mempunyai jawaban yang berbeda. Perempuan cenderung menentang sikap yang ilegal daripada laki-laki. Menurut Dharma (2016), perbedaan gender mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Astuti dan Panjaitan (2017) menyimpulkan bahwa e-Faktur memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2013 dalam Astuti dan Panjaitan 2017), yang menyatakan e-Faktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

H₃: Gender dapat Memoderasi Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

4. Pengaruh Gender dalam Memoderasi Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Tujuan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui penerapan e-SPT diantaranya adalah: (1) Dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan, (2) Efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama, (3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP. (4)

Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan, (5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia (Aryani, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dyanrosi (2015) tentang pengaruh jenis kelamin (*gender*) terhadap persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*) sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disebut dengan *e-filing* diperoleh hasil koefisien jalur sebesar 0.085. Koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa pengaruh jenis kelamin terhadap persepsi kemudahan penggunaan adalah berbanding lurus. Nilai t-hitung yang diperoleh adalah 0,909<t-tabel yaitu 1.98, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*) *e-filing*. Hal tersebut dikarenakan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merasakan kemudahan dalam menggunakan *e-filing*.

H₄: Gender dapat Memoderasi Pengaruh Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen (X)

1) E-FAKTUR (X_1)

Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Sarah & Sandra, 2016). Pada dasarnya faktur pajak dibuat saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran, faktur pajak hanya dibuat oleh pengusaha kena pajak.

2) E-SPT (X₂)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer (Diana dan Setawati, 2004: 9). Tujuan dari e-SPT adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan Wajib Pajak dan mempermudah pelaporan SPT.

b. Variabel Moderating (M)

Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi yaitu variabel Gender. Gender dibagi menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga responden dari penelitian ini menggunakan pegawai/karyawan laki-laki dan perempuan. Menurut

Desi (2011), Gender adalah perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan dari Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

c. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: (1) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; (2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan; (3) kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan (4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Devano dan Rahayu, 2006: 111). Kepatuhan wajib pajak bisa diukur dengan kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menggunakan e-Faktur pajak sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak pada ketetapan waktu penyampaian SPT dan tidak menunggak pajaknya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yaitu pengaruh penerapan e-SPT dan e-Faktur terhadap pengusaha kena pajak. Sasaran dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paratama Makassar Selatan. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena wilayah yang mudah dijangkau dan strategis yang mencakup 4 wilayah kecamatan, antara lain: 1. Kecamatan Manggala; 2. Kecamatan Panakukang; 3. Kecamatan Rappocini dan 4. Kecamatan Makassar.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1Jumlah PKP Tahun 2016 – 2018 di KPP Makassar Selatan

No.	Tahun	Jumlah Pengusaha Kena Pajak	
1	2016		683
2	2017		508
3	2018		677

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, 2019.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan "Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel Moderasi" dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Falerian R.A	Pengaruh	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa
Tamboto	Penerapan e-		penerapan e-SPT PPN berpengaruh
(2013)	SPT PPN IVER	SITAS ISLA	terhadap efisiensi pengisian SPT
	Terhadap		menurut persepsi pengusaha kena
	Efisiensi		pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
	Pengisian SPT		Pratama Manado.
	PPN Menurut	KAS	SAR
	Ersepsi	K A O	O A N
	Pengusaha		
	Kena Pajak		
	pada KPP		
	Pratama		
	Manado		
Dini Wahyu	Analisis	Kuantitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan
Hapsari	Penerapan e-		bahwa penggunaan sistem
(2014)	SPT PPN		komputerisasi pajak dengan
	terhadap		program e-SPT dari hasil

Peneliti	Judul	Jenis	Hasil Penelitian
		Penelitian	
	Kepatuhan		perhitungan kuesioner atas tiga
	Wajib Pajak		indikator rata-rata responden
			menjawab setuju dan penggunaan
			sistem komputerisasi pajak dengan
			e-SPT memiliki pengaruh yang
N/ 1 1	D 1	TZ .::C	kuat.
Muhamad	Pengaruh	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan
Kubrajaya	Penerapan		bahwa penerapan e-SPT
Kader,	Elektronik Surat		berpengaruh secara signifikan
Harijanto	Pemberitahuan		terhadap efisiensi pengisian SPT
Sabijono dan	(e-SPT)		menurut persepsi Pengusaha Kena
Heince R.N	terhadap		Pajak di Kecamatan Sario, Kota
Wokas	Efisiensi		Manado.
(2015)	Pengisian Surat	1000	
	Pemberitahuan		
	(SPT) Wajib		
	pajak di		
	Kecamatan		
	Sario Kota		
D '	Manado	TZ 4:4 4:C	11 '1 1'2' 1
Regina	Analisis	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan
Agriany	Penyampaian		keefektifan penyampaian SPT
Suhartanto	SPT Tahunan		Tahunan dari tahun 2010 sampai
dan Jenny	dan		2014 mengalami penurunan,
Morasa	Perkembangan		sedangkan perkembangan PKP
(2015)	Pengusaha Vana Paiak	SITAS ISLA	mengalami peningkatan. Sebaiknya
	Kena Pajak	3 17	pimpinan KPP Pratama Bitung lebih memperhatikan tata cara
	pada Kantor Pelayanan Pajak		pelaporan SPT khusunya e-SPT.
	Pratama Bitung		
		V A C	Semakin banyak wajib pajak yang memahami cara penyampaian SPT,
	M A	K A S	semakin banyak pula wajib pajak
			melaporkan beban pajaknya
			sehingga pendapatan negara dari
			sektor pajak mengalami
			peningkatan.
I Nyoman	Penerapan E-	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan
Putra Yasa	Faktur	Tauantaun	bahwa Pengusaha kena pajak
(2016)	dan Persepsi		merasakan manfaat dari penerapan
(2010)	Pengusaha		e-Faktur dan menilai bahwa
	i ciigusalla		c-i aktui uan memiai banwa

Peneliti	Judul	Jenis	Hasil Penelitian
T CHOILE		Penelitian	
	Kena		aplikasi e-Faktur mudah untuk
	Pajak (PKP)		digunakan, serta pengusaha kena
	(Studi pada		pajak memiliki minat untuk
	Pengusaha		menggunakan sistem e-Faktur.
	Kena Pajak di		
	Kabupaten		
	Buleleng).		
	Jurnal Riset		
	Akuntansi		
Nindy	Pengaruh	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan
Alfioreta,	Penerapan		bahwa penerapan sistem e-Faktur
Indah	Sistem e-Faktur		berpengaruh positif dan
Purnamawati	terhadap		signifikan terhadap kepatuhan
dan Kartika	Kepatuhan	IULL	pengusaha kena pajak, pemahaman
(2016)	Pengusaha		Internet tidak berpengaruh terhadap
	Kena Pajak	pools,	Penerapan Sistem e-Faktur
	dengan		dan Kepatuhan Pengusaha Kena
	Pemahaman		Pajak jika Pemahaman Internet
	Internet sebagai		dijadikan sebagai variabel
	Variabel		moderasi.
	Moderasi (Studi		
	Empiris pada		
	pengusaha Kena		
	pajak yang		
	Terdaftar		
	menggunakan	SITAS ISI A	M NEGERI
	e-Faktur pada	DITAG IGLA	NV NEGERI
	Kantor		
	Pelayanan Pajak		
	Pratama Jember		
Ahmad Fida	Persepsi Wajib	Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan
dan Aristanti	Pajak Mengenai		bahwa persepsi wajib pajak
Widyaningsih	Penerapan e-		mengenai penerapan e-faktur
(2017)	Faktur terhadap		tergolong dalam kategori tinggi,
	Kepatuhan		tingkat kepatuhan wajib
	Wajib Pajak		pajak tergolong dalam kategori
			tinggi dan persepsi wajib pajak
			mengenai penerapan
			e-faktur memiliki pengaruh positif
			terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti	Judul	Jenis	Hasil Penelitian
1 chenu		Penelitian	Hasii i chentian
Kevin	Analisis	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan
Lintang,	Penerapan e-	dan	tingkat kepatuhan pengusaha kena
Lintje	Faktur Pajak	Kualitatif	pajak pengguna e-Faktur pada 6
Kalangi dan	dalam Upaya		bulan pertama sejak penerapan e-
Rudy Pusung	Meningkatkan		faktur yakni sebesar 74,62%. Hal
(2017)	Kepatuhan		ini menunjukkan bahwa penerapan
	Pengusaha		e-Faktur masih tergolong kurang
	Kena Pajak		efektif dalam hal meningkatkan
	untuk Pelaporan		kepatuhan pengusaha kena pajak
	SPT Masa PPN		pembuat faktur yang terdaftar pada
	Pada KPP		KPP Pratama Manado.
	PRATAMA		
	MANADO		
Farida Aryani	Persepsi	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyatakan
(2017)	Pengusaha		bahwa menurut persepsi PKP
	Kena pajak	1000	tentang urgensi, tujuan dan
	(PKP) tentang		sosialisasi yang baik. Selain itu
	Penerapan e-		tidak ada kendala yang berarti
	SPT Pajak		dalam pelaksanaan
	pertambahan		e-SPT, hanya akses internet yang
	Nilai (PPN) dan		masih rendah sinyal. Laporan SPT
	Kemudahan		melalui media e-SPT lebih mudah,
	Pelaporan SPT-		lebih cepat, akurat dan efisien untuk
	Masa PPN pada		waktu dan biaya.
	KPP Pratama		-
	Sekayu		MINECERI
Aprilian	Pengaruh	Kuantitatif	Hasil Penelitian ini menyatakan
Kusuma	Pengungkapan		bahwa keberadaan perempuan
Ningrum,	Corporate		dalam dewan komisaris dan direksi
Eny Suprapti	Social		(gender) dapat memperkuat
dan Achmad	Responsibility	KAS	pengaruh corporate social
Syaiful	Terhadap Tax		responsibility (CSR) dengan tax
Hidayat	Avoidance		avoidance.
Anwar	dengan Gender		Sehingga keberadaan perempuan
(2018)	sebagai		dalam dewan perusahaan tidak
	Variabel		dapat memberikan kontribusi dalam
	Moderasi (Studi		pengambilan keputusan
	Empiris pada		yang tepat untuk melakukan
	Perusahaan		pengungkapan secara luas dan
	Manufaktur		praktik tax avoidance.

Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)		

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian adalah:

- Mengetahui pengaruh penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Mengetahui pengaruh penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Mengetahui pengaruh Gender dalam memoderasi penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 4. Mengetahui pengaruh Gender dalam memoderasi penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menguji keberlakuaan *Tax Moral Theory* dalam penggunaan e-Faktur dan e-SPT. *Tax Moral Theory* lebih mengacu kepada timbal balik hubungan antara wajib pajak dan juga DJP. Wajib pajak menganggap bahwa apabila DJP memberikan banyak kemudahan bagi WPnya maka

WP juga akan merespon positif atas perlakuan tersebut. Dalam penelitian DJP telah memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak dalam menerapkan adanya sistem terbaru yaitu elektronik pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan teori yang telah diperoleh saat proses perkuliahan khususnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kepatuhan Wajib Pajak, serta implementasi komponen-komponen serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

2) Bagi KPP Pratama Makassar

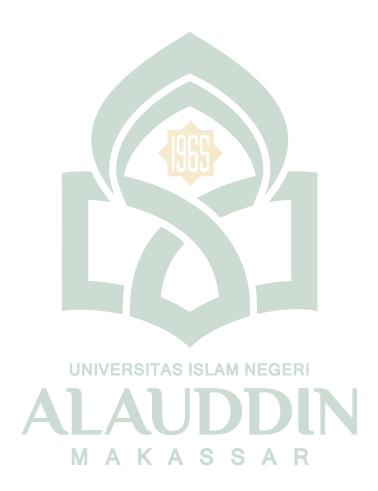
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan E-Faktur dan E-SPT terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.

4) Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai e-Faktur dan e-SPT.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory)

Moral perpajakan (*tax morale*) diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk kepatuhan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2005). Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan (Cahyonowati, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Semakin besar denda pajak maka akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak. Menurut Suryadi (2016), variabel tax morale dapat menentukan sikap wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya bahwa melanggar etika ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan peradilan serta institusi dari aparat pajak, begitupula bahwa perasaan bersalah ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya artinya perasaan bersalah sangat didasari dari kepribadian dan perilaku yang akan memberikan implikasi terhadap

kepatuhannya dalam melaporkan pajaknya sedangkan prinsip hidup ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya, karena pada umumnya wajib pajak dapat bertindak sesuai dengan niat untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

B. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah model yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mampu memprediksi persepsi pengguna terkait manfaat dan kemudahan dalam menggunakan untuk menentukan sikap terhadap penerapan teknologi Informasi (Yudi & Tambotoh, 2013). Davis et al (1989) menyusun model Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan model konseptual dari penerimaan pengguna terhadap sistem informasi teknologi atau teknologi baru. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan adaptasi dari model Theory of Reasoned Action (TRA) yang secara khusus dirancang untuk model penerimaan penggunaan sistem informasi. Tujuan utama TAM adalah memberikan penjelasan tentang penentuan penerimaan komputer secara umum, memberikan penjelasan tentang perilaku atau sikap pengguna dalam suatu populasi.

Model TAM mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk menjelaskan pengguna yang mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna. Ciri khas dari Model TAM adalah sederhana namun bisa memprediksi penerimaan maupun penggunaan teknologi (Fatmawati, 2015). Technology acceptance model (TAM) ini menjelaskan bahwa seseorang dalam

melakukan sesuatu didorong oleh dua faktor yaitu behavior beliefs dan Normatif beliefs. Faktor tersebut kemudian mendorong seseorang untuk memiliki outcome evaluation dan motivation to comply. Sehingga kedua hal tersebut akan mendorong seseorang untuk berperilaku (Attitude) dan Norma-Norma Pribadi (Subjective Norms). Adanya Attitude dan Subjective Norms akan mempengaruhi perhatian/fokus seseorang dalam berberilaku (behavior intention). Pada akhir Behavior Intention akan mempengaruhi pada perilaku seseorang (behavior) (Putarta & Sayekti, 2016).

Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi (Adhiputra, 2015).

C. Pajak dalam Perspektif Islam SILAM NEGERI

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan menurut Adriani (1998) dalam Jamaluddin (2011) mengatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: (1) Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah; (2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan; (3) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah; (4) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah; (5) pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik; (6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah; (7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Ilyas & Burton (2012) dalam Tindagi & Morasa (2014), menyatakan bahwa dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. 1. Fungsi budgetair, fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2. Fungsi regulerend, pajak mempunyai fungsi mengatur artinya

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 3. Fungsi *demokrasi*, suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. 4. Fungsi *redistribusi*, fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Sebagai masyarakat wajib pajak, diperlukan peran serta semua lapisan masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan pajak dari semua sektor yang ada. Mendasarkan pada teori hukum positif, bahwa dalam hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban untuk mentaati, dan kekuasaan yang berdaulat, maka perlu peran aktif dari pemerintah untuk melakukan continual improvement dalam menggali potensi pengenaan pajak dan mempertimbangkan penggabungan dua sistem pemungutan pajak antara *Official Assesment System* dan *Self Assesment System* dengan menghilangkan kelemahan dan hambatan dari masing-masing sistem tersebut (Rahmanto, 2015).

Seperti halnya pajak, dalam ajaran islam seorang yang sudah dikatagorikan mampu diwajibkan untuk megeluarkan zakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat). Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, yang semua itu dapat diperoleh dari mengeluarkan zakat, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan. Zakat bukan hanya dapat

menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya (Turmudi, 2015).

Menurut Turmudi (2015), Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (tax) dikenakan kepada penduduk non muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (double duties) berupa zakat dan pajak. Oleh karenanya timbul masalah dan hambatan mengenai persepsi kewajiban umat Islam dalam hal pembayaran pajak dan zakat, yakni:

- 1. Salah satu hambatan untuk memungut pajak di kalangan masyarakat modern adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban kepada negara dan tidak mengandung nilai ibadah mahdhoh. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tetapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah transfer pendapatan kekayaan dari orang orang yang kaya kepada yang miskin, yang membutuhkan serta kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama.
- 2. Pembayaran zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana pembayaran pajak. Permasalahannya adalah, pada zaman Khalifah Abu Bakar Sidiq dan Ummar Ibnu Khattab, zakat memang merupakan penerimaan utama negara. Pajak (Kharaj) memang ada yang hanya dikenakan kepada non muslim.

3. Masalah lain yang menjadi keberatan banyak muslim adalah karena mereka harus melakukan kewajiban ganda, yakni membayar pajak dan zakat, walaupun mereka menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang penyalurannya harus sesuai ketentuan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَيمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ أَللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ أَللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ أَللَّهُ عَلِيمً حَكِيمُ اللَّهِ أَللَّهُ عَلِيمً حَكِيمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمً حَكِيمُ اللهِ اللهِ عَلِيمً حَكِيمُ اللهِ اللهِ عَلِيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلْمِيمُ اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهِ عَلَيمً اللهُ عَلَيمً اللهِ عَلَيمَ اللهِ عَلَيمَ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمَ اللهِ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ اللهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ الله

Terjemahannya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. 09:60)

Berdasar kepada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 tersebut, maka yang berhak menerima zakat Ialah:

- Orang fakir yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- Orang miskin yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

- Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6. Orang berhutang yakni orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7. Pada jalan Allah (fi sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Tujuan pajak dan tujuan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional, karena adanya banyak persamaan pokok antara pemanfaatan zakat dan pemanfaatan

pajak, meski ada segi-segi khusus yang membedakannya seperti persyaratan pajak dan zakat serta penonjolan bidang yang didanai zakat dan pajak. Baik dan buruknya suatu sistem perpajakan tergantung dari dampaknya pada masyarakat. Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak. Suatu sistem dimana kesejahteraa ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan.

D. Faktur Pajak dan E-Faktur

Menurut Purwono (2010: 284), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Undang-undang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. Sejalan dengan mekanisme pemungutan yang ada dalam PPN, faktur pajak dibuat oleh pihak yang memungut PPN yaitu yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau dibedakan dengan faktur penjualan.

Jenis faktur pajak dibedakan menjadi tiga jenis yaitu faktur pajak standar, faktur pajak gabungan dan faktur pajak sederhana. Faktur pajak standar merupakan faktur pajak yang digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Sedangkan faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang meliputi semua penyerahan barang kena ajak atau penyerahan jasa kena pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama. Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak

untuk menampung kegiatan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir (Waluyo, 2008: 257). Sejak ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010, faktur pajak yang digunakan hanya satu bentuk, sehingga istilah bentuk faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana tidak berlaku lagi. Selain itu, ada beberapa dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sama sebagai faktur pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (Purwono, 2010: 285).

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: (1) penyerahan Barang Kena Pajak; (2) penyerahan Jasa Kena Pajak; (3) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau (4) ekspor Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan dalam butir b.

- b. Keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak
 - Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
 - 2) nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
 - jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - 4) PPN yang dipungut;
 - 5) PPn BM yang dipungut;
- INUI
- 6) kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- 7) nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- c. Setiap Faktur Pajak harus menggunakan Kode dan Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
 - Kode Faktur Pajak terdiri dari:
 - 1) 2 (dua) digit Kode Transaksi;
 - 2) 1 (satu) digit Kode Status; dan
 - 3) 3 (tiga) digit Kode Cabang. \triangle
 - Nomor seri Faktur pajak terdiri dari:
 - 1) 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
 - 2) 8 (delapan) digit Nomor Urut.

- d. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua yaitu:
 - Lembar ke-1: Untuk Pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
 - 2) Lembar ke-2: Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran.

Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari rangkap dua, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

- e. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan Faktur Pajak cacat;
- f. Dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka PKP dapat membuat Faktur Pajak dengan cara:
 - 1) Dibuat lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang sama, ditandatangani setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian baris Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termijn, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan PPN cukup diisi pada lembar Faktur Pajak terakhir; atau
 - 2) Dibuat satu Faktur Pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal Faktur Penjualan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.

- g. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat (dapat lebih dari 1 orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak.
- h. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak.
- Atas Faktur Pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat membuat Faktur Pajak Pengganti.

Menurut Sarah & Sandra (2016), bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. E-Faktur tidak diwajibkan dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*) sehingga mengurangi penggunaan kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Langkahlangkah yang harus dilakukan PKP sebelum menggunakan e-Faktur (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 17/PJ/2014). Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan PKP sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur, antara lain:

 PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana

- diatur dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- 2. Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a) Diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
 - b) Disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan.
- 3. Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- 4. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
 - b) PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.
- 5. Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:
 - a) menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh
 Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

- sebagaimana diatur dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
- b) Mengirimkan *Password* melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- 6. Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- 7. Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- 8. PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
- 9. Dalam hal PKP tidak menerima *Password* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus melakukan update email.

- 10. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- 11. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
- 12. PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:
 - a) Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
 - b) Laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

13. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan *Password* sebelum 1 Juli 2014.

E. Surat Pemberitahuan (SPT) dan E-SPT

Menurut Diana dan Setawati (2004: 9), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Sedangkan dalam peraturan DJP nomor 6/PJ/2009 pasal 1 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik dijelaskan, E-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Aryani (2017), tujuan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui penerapan e-SPT diantaranya adalah: (1) Dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan, (2) Efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama, (3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP. (4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek

yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan, (5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Menurut Rais dan Sherly (2015), kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Dalam sistem pelaporan SPT menggunakan e-SPT terdapat kemudahan-kemudahan antara lain: aplikasi e-SPT mudah dipelajari, ada sistem perbaikan kesalahan hitung, cukup akses melalui website, memiliki panduan pelaporan, bisa dilakukan dimana saja selama ada jaringan internet, tidak ada batas waktu karena dapat dilakukan 7x24 jam.

Selain itu, menurut Aryani (2017), e-SPT mempunyai banyak kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan SPT secara kertas, antara lain: (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flashdisk, (2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik karena sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, (3) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan system komputer, (4) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak karena data yang disampaikan WP selalu lengkap dan penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer, (5) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2002: 23), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Bersamaan dengan Program Reformasi Sistem Perpajakan Nasional Tahun 1983, Pajak Penjualan yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang Darurat nomor 19 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953, sejak tanggal 1 april 1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam kurung waktu lebih dari tiga dasawarsa, Undang-undang Pajak Penjualan 1951 telah menunjukkan dedikasinya dalam pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia. Namun demikian, dalam rangka melaksanakan program reformasi (Pembaharuan) Sistem Perpajakan Nasional tahun 1983, Undang-undang Pajak Penjualan 1951 akhirnya dinyatakan tidak berlaku dan diganti oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Menurut Sukardji (2002: 19), Karakteristik (Legal Character) Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Sedangkan Penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan minta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tersebut, bukan pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban ditentukan oleh faktor Objektif, yaitu adanya taatbestand. Adapun yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.

3. Multi Stage Tax

Multi Stage Tax adalah karekteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (manufacturer) kemudian di tingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method

Pajak yang dipungut oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (input tax) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (output tax). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan tax credit. Oleh karena itu pola ini dinamakan juga metode pengkreditan (Credit method). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang inin dinamakan Faktur Pajak (tax invoice), sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur (invoice method).

- 5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik.
 - Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral
 Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu:
- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa

b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle).

Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu:

- 1) Prinsip tempat asal (origin principle);
- 2) Prinsip tempat tujuan (destination principle).
- 7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja. Keadaan ini berbeda dengan situasi dalam era UU PPn 1951, yang dalam pelaksanaanya, Pengusaha tidak diberi hak untuk memperoleh kembali PPn yang dibayar atas perolehan bahan baku/pembantu atau barang modal.

G. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Jamaluddin, 2011 : 216). Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha

Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang: (1) memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau (2) tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak paling lama akhir bulan berikutnya (Mardiasmo, 2016: 33).

Menurut Yasa (2016), Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk: (1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak; (2) Memungut PPN dan PPn BM yang terutang; (3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan (4) Melaporkan penghitungan pajak.

H. Gender

Kata gender ada juga yang menggunakan kata jender dengan merujuk pada pelafalannya berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti jenis kelamin. ¹Dalam *Webster"s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku." ² Di dalam *Women"s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. ³ Term gender jika ditinjau dalam perspektif terminologis

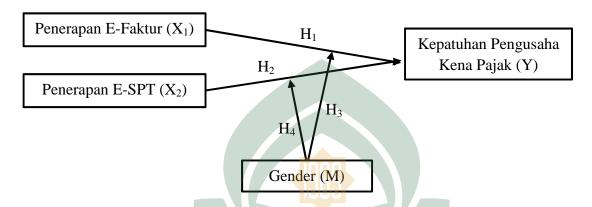
merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris.⁴ Kata gender ini jika dilihat posisinya dari segi struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (*noun*) yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, sex,⁵ atau disebut dengan *al-jins* dalam bahasa Arab.⁶ Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender, maka yang dimaksud adalah jenis kelamin dalam konteks pendekatan bahasa. Term ini masih terbilang kosa kata baru yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Istilah ini menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade terakhir (Syamsiah, 2014).

Penelitian yang dilakukan Puspitawati (2010) menemukan bahwa perempuan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai aktor yang berperan sebagai figur ekspresif, yaitu berfungsi sebagai pemelihara dan pendidik keluarga, sedangkan laki-laki dipersepsikan oleh masyarakat sebagai figur instrumental, yaitu berfungsi sebagai pencari nafkah keluarga. Jenis kelamin, contoh perempuan, mempunyai perspektif gender yang lebih baik dibandingkan dengan, contoh laki-laki, yaitu persepsi terhadap peran gender dalam pekerjaan domestik dan dalam pekerjaan publik dan sosial. Contoh perempuan lebih fleksibel dalam melaksanakan peran gender di sektor domestik maupun publik, dan cenderung mempunyai persepsi peran gender yang dapat diubah atau ditukarkan.

I. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir ini dirancang untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan penambahan variabel moderasi. Variabel independen pada penelitian ini adalah E-Faktur (X_1) dan

penerapan E-SPT (X_2) , kemudian variabel dependen yaitu kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y) dan variabel moderating adalah Gender (M). Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dalam model penelitian berikut ini:



Gambar 2.1 Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel Moderasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Adapun penelitian kuantitatif menurut Kuncoro (2013: 145) adalah penelitian yang jenis datanya dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Karakteristik masalah yang diangkat adalah penelitian yang bersifat korelasi. Dimana penelitian ini berusaha untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat (Kuncoro, 2013: 12), menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas penerapan e-Faktur dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Selatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

B. Pendekatan Penelitian

Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan secara sederhana fenomena yang ada dengan menggunakan angka untuk mengelompokkan individu atau kelompok (Suharsaputra, 2012: 42)

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Morissan (2012: 109) populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep, atau fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan sejumlah 677 pada tahun 2018. KPP Pratama Makassar Selatan dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena wilayah yang mudah dijangkau dan strategis yang mencakup 4 wilayah kecamatan, antara lain: 1. Kecamatan Manggala; 2. Kecamatan Panakukang; 3. Kecamatan Rappocini dan 4. Kecamatan Makassar.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.

Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik *convenience sampling* atau pengambilan sampel mudah. Penelitian ini memilih sampel dari populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Sampel pada penelitian adalah Pengusaha Kena Pajak yang datang ke KPP Makassar Selatan. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan nilai presisi 10% yaitu:

$$\begin{array}{c}
A & N \\
N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N & N \\
N & N & N & N & N & N & N & N$$

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Nilai Presisi (Ketepatan)

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan digunakan adalah 87,1 dibulatkan menjadi 87 sampel.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data primer yang diperoleh menggunakan metode survei.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner (Umar, 2014: 42). Data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari angket atau kuesioner yang disebarkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang tersebar di KPP Makassar Selatan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini fakta yang diungkapkan merupakan fakta sesungguhnya yaitu data yang diperoleh dari kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data dari responden. Untuk memperoleh data yang sesungguhnya kuesioner dibagikan secara

langsung kepada responden atau Pengusaha Kena Pajak yang tersebar di KPP Pratama Makassar Selatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner dengan menggunakan skala likert. Skala likert dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang atau sekelompok orang. Adapun kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimana dalam pengisian kuesioner sudah tersedia jawabannya sehingga responden tinggal memilih.

G. Metode Analisis Data

1. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data responden.

2. Analisis Deskriptif

Salah satu bentuk analisis adalah menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan (Kuncoro, 2013: 198) Untuk menentukan besar presentase digunakan rumus :

Distribusi Frekuensi =
$$F + \frac{100\%}{N}$$

Keterangan:

F = Frekuensi

N = Jumlah Subjek Penelitian

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan (Umar, 2014: 166). Suatu kuesioner bisa dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun penentuan uji validitas pada penelitian ini adalah menggunakan rumus korelasi Product Moment.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Misal, seseorang yang telah mengisi kuesioner dimintakan mengisi lagi karena kuesioner pertama hilang. Isian kuesioner pertama dan kedua haruslah sama atau dianggap sama (Umar, 2014: 168). Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang pada pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal (Basuki & Prawoto, 2016: 57). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distibusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas atau kolinearitas ganda (*Multicollinearity*) adalah adanya hubungan linear antara peubah bebas X dalam Model Regresi berganda (Basuki & Prawoto, 2016: 61). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi, maka dari itu variabel-variabel ini tidak orthogonal. Maksudnya yaitu variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Basuki & Prawoto, 2016: 63). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode – t dengan kesalahan pada periode t – 1. Uji durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen . Hipotesis yang akan diuji adalah : Ho = tidak ada autokorelasi (r=0), dan Ha = ada korelasi (r=0) (Ghozali, 2006).

5. Uji Hipotesis



a. Analisis Regresi Lineir Berganda

Analisis Regresi Lineir Berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana di mana terdapat lebih dari satu variabel independen x (Uyanto, 2009). Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah penerapan e-SPT dan penerapan e-Faktur. Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

= Konstanta

1- 2 = Koefisien regresi

 X_1 = Penerapan e-Faktur

 X_2 = Penerapan e-SPT

e = Error

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linier (Sinambela dkk, 2014). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hipotesis Nol (H_0) adalah hipotesis yang meniadakan perbedaan antar kelompok atau meniadakan hubungan sebab akibat antar variabel yang artinya selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Sementara Hipotesis Alternatif (H_A) adalah penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional (Setyawan, 2014). Hipotesis H_0 yang hendak diuji apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol. Artinya,

semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol. Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternative (HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol. Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Makassar Selatan

1. Sejarah KPP Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 sebagai salah satu implementasi dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktur dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktur Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertical yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan berkedudukan di Kompleks Gedung Keuangan Negara I, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar. Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008,

KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008.

Pada awal mula beroperasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs. Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksana. Selanjutnya sampai dengan April 2015, KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor, 10 Orang Kepala Seksi, 9 Fungsional Pemeriksa Pajak, 1 Fungsional Penilai PBB, 32 Account Representative, 2 Juru Sita, 2 Operator Console, 1 Bendaharawan, 1 Sekretaris, dan 32 Pelaksan.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari sepuluh seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepuluh seksi tersebut merupakan kelompok structural yang dikepalai oleh masing-masing seorang Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbag. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menjalankan tugasnya memeriksa ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Selatan beserta tugas dan fungsinya.

1) Kepala Kantor

Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan perpajakan dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-surat yang akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar Selatan.

3) Seksi Pengolahan data dan Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

4) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan membawahi "Tempat Pelayanan Terpadu". Atau biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukun perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

5) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen dokumen penagihan.

6) Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.

Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penatausahaan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8) Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III, dan IV.

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai Account Representative (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam empat seksi

waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk Kecamatan Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV.

9) Fungsional Pemeriksa

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

2. Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu dari tiga KPP Pratama yang ada di Kota Makassar. Kantor ini mencakup empat wilayah administrasi kecamatan, yaitu Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan Manggala. Total luas wilayah kerja mencapai 52,94 km2 yaitu mencakup 30,12 persen luas wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk dalam wilayah kerja tersebut sebanyak 466.272 jiwa yaitu melingkupi sebanyak 37,19 persen dari total penduduk di Kota Makassar dengan kepala keluarga berjumlah 95.980 atau sebesar 32,38 persen dari total kepala keluarga di Kota Makassar. Jumlah kelurahan dalam wilayah kerjanya sebanyak 41 kelurahan yaitu sebesar 28,67 persen dari seluruh kelurahan yang terdapat di Kota Makassar.

Dari empat kecamatan wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, luas wilayah Kecamatan Manggala mencapai 45 persen dari seluruh wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebesar 32 persen,

Kecamatan Rappocini 17 persen, dan terakhir Kecamatan Makassar sebesar 5 persen. Namun demikian, luas wilayah bukan satu-satunya faktor penentu potensi perpajakan suatu wilayah. Faktor lain yang menentukan adalah jumlah penduduk per kecamatan. Dari jumlah penduduknya, Kecamatan Rappocini menempati urutan pertama yaitu sebanyak 145.090 jiwa atau sebesar 31,12 persen. Selanjutnya, berturut-turut disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (29,29 persen), Kecamatan Manggala sebanyak 100,484 jiwa (21,55 persen), dan Kecamatan Makassar sebanyak 84.143 jiwa (18,04 persen). Presentasi wilayah, keluarahan, penduduk dan kepala keluarga di Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Presentasi Wilayah, Kelurahan, Penduduk dan Kepala Keluarga

No	Keterangan	Luas	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Wilayah	Kelurahan	Penduduk	KK
1.	KPP Pratama	52,94	41	466,272	95,98
	Makassar				
	Selatan				
2.	Kota	175,77	143	1253656	296374
	Makassar	I INIIVEDOIT	AC ICI AM NI	CEDI	
	Persentase	30.12%	28,67%	37,19%	32,38%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (2019)

3. Visi dan Misi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan memiliki visi "Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat" dan misinya yaitu "Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan". Selain itu, KPP

Pratama Makassar Selatan juga memiliki motto pelayanan "Senyum, Peduli dan Profesional".

B. Gambaran Responden

1. Karakteristik Responden

Kuesioner yang dibagikan berjumlah 95 dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase			
1	Kuesioner yang disebarkan	95	100 %			
2	Kuesioner yang tidak kembali	7	7,36%			
3	Kuesioner yang kembali	88	92,6 %			
4	Kuesioner yang cacat	1//	1,0 %			
5	Kuesioner yang dapat diolah	87	91,5 %			
	n sampel = 87 Responden Rate = (87/95) x 100% = 91%					

Tabel 4.2 mennujukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 95 butir dan kuesioner yang kembali 88 dan dapat diolah adalah sebanyak 87 butir atau pada tingkat pengembalian dapat diperoleh adalah 91,5 % dari total yang disebarkan. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 7 butir atau tingkat yang diperoleh sebesar 7,36 %. Dari kuesioner yang tidak kembali sebesar 7 butir disebabkan karena kesibukan dan keterbatasan waktu untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner. Sedangkan kuesioner yang cacat atau tidak dapat diolah sebesar 1,0%.

Terdapat empat karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lamanya dikukuhkan sebagai

pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki- Laki	46	52,87%
2	Perempuan	41	47,12%
	Jumlah	87	100%

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah reponden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang atau sebesar 52,87 % sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 41 orang atau sebesar 47,12 %. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak yang berada di lingkup wilayah kantor pelayanan pajak pratama Makassar Selatan yang patuh membayar kewajibannya di dominasi oleh pengusaha berjenis kelamin perempuan. Banyaknya pengusaha kena pajak yang berjenis kelamin laki-laki salah satunya disebabkan oleh jumlah dari pengusaha yang berjenis laki-laki itu sendiri dibandingkan dengan pengusaha yang berjenis kelamin perempuan serta adanya beberapa alasan lainnya.

b. Usia

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presemtase
1	18-30 Tahun	21	24,13%
2	31-40 Tahun	30	34,48%
3	41-50 Tahun	28	32,58 %

4	>50 Tahun	8	9,19%
	Jumlah	87	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa usia paling banyak di dominasi usia antara 31-40 yaitu tahun sebanyak 30 orang dengan tingkat presentase 34,448%. Tingkat kedua tertinggi yakni usia 41-50 tahun yakni sebanyak 28 orang dengan tingkat presentase 32,58% tingkat ketika yaitu usia 18-30 tahun yakni sebanyak 21 orang dengan tingkat presentase 24,13% dan tingkat terendah adalah usia > 50 tahun sebanyak 8 orang dengan tingkat presentase sebesar 9,19%.

c. Tingkat pendidikan

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidika	Tingkat Pendidikan		Presentase
1	SMA		18	20,68%
2	D3		5	5,74%
3	S1		59	67,81%
4	S2		4	4,59%
5	S3		1	1,14%
	Jumlah		87	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2020) AS ISLAM NEGERI

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SMA 18 orang responden, dengan tingkat presentase sebanayak 20,68%, D-3 sebanyak 5 responden dengan tingkat presentase 5,74%, pendidikan S-1 sebanyak 59 responden dengan tingkat presentasi 67,81%, pendidikan S-2 sebanyak 4 responden dengan tingkat presentase 4,59%%, pendidikan S-3 sebanyak 1 responden dengan tingkat presentase sebesar 1,14%.

d. Lamanya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa

No	Masa Kerja	Jumlah	Presentase
1	0-5 Tahun	55	63,21%
2	6-10 Tahun	24	27,58 %
3	>10 Tahun	8	9,19%
	Jumlah	87	100 %

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak rentang waktu 0-5 tahun sebanyak 55 responden dengan tingkat presentase 63,21%, dikukuhkan selama 6-10 tahun sebanyak 24 responden dengan tingkat presentase 27,58%. Selanjutnya dengan rentang waktu >10 tahun sebanyak 8 responden dengan tingkat presentase 9,19% dalam penelitian ini.

2. Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Variabel

RSITAS ISLAM NEGER Tabel 4.7

Descriptive Statistics

A	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Faktur	87	34,00	50,00	41,5287	3,92914
E-SPT	87	30,00	50,00	41,9655	4,23015
Gender	87	,00	1,00	,5287	,50207
Kepatuhan PKP	87	16,00	25,00	21,1724	2,44572
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Pada kolom minimum akan menunjukkan nilai terendah dalam variabel

sedangkan kolom maximum menunjukkan nilai tertinggi dalam variabel. Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap E-faktur nilai minimum sebesar 34, nilai maximum sebesar 50 serta nilai rata-ratanya (mean) 41,52 dengan standar deviasi sebesar 3,92. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statisik deskriptif terhadap variabel E-SPT menunjukkan nilai minimm sebesar 30, nilai maximum 50, dan mean (rata-rata) 41,96 dengan standar deviasi sebesar 4,23. Selanjutnya hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel gender menunjukkan nilai minimum sebesar 0, maximum 1 dan nilai mean (rata-rata) sebesar 0,52 dengan standar deviasi sebesar 0,50. Selanjutnya hasil analisis deskriptif terhadap variabel Kepatuhan PKP menunjukkan nilai minimum sebesar 16, sedangkan maximum 25, dan Mean (rata-rata) 21,17 dengan standar deviasi sebesar 2,44.

b. Analisis Deskriptif Pernyataan

1) Analisis Deskripsi Pernyataan E-Faktur

UNIVERSITABEI 4.8 M NEGERI Deskripsi Item Pernyataan Variabel E-Faktur

Jawaban Responden	STS	TS	RG	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot	1	2	3	4	5		
X1. ₁	AK	A	SS	35	52	400	4,59
X1. ₂		5	7	59	16	347	3,98
X1. ₃		25	9	47	6	295	3,39
X1.4			4	51	32	376	4,32
X1. ₅			4	56	27	371	4,26
X1. ₆		1	11	57	18	353	4,05
X1. ₇			1	60	26	373	4,28
X1.8		1	2	59	25	369	4,24
X1.9				71	16	364	4,18
X1. ₁₀			1	68	18	365	4,19

Rata-rata Keseluruhan	4,14	
-----------------------	------	--

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa 87 responden yang diteliti. Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan pada E-Faktur berada pada skor 4,14. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden memberikan persepsi setuju pada variabel E-Faktur. Pada variabel E-Faktur terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 4,59. Berada pada item pernyataan kelima yang menunjukkan bahwa pengguna E-Faktur sangat setuju menyatakan bahwa dengan adanya E-Faktur lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan yang manual.

2) Analisis Deskripsi Pernyataan E-SPT

Tabel 4.9 Deskripsi Item Pernyataan Variabel E-SPT

Jawaban Responden	STS	TS	RG	S	SS	Total	Rata-
							rata
Bobot	1	2	3	4	5		
X2. ₁			1	33	53	400	4,59
X2. ₂		1	23	48	15	338	3,88
X2. ₃		22	12	46	7	299	3,43
X2.4	IIVED	1,0	1	49	36	381	4,37
X2. ₅	ALVEIV.	JIIAO	6	52	29	371	4,26
X2. ₆		1	2	53	32	378	4,34
X2. ₇			3	69	15	360	4,13
X2. ₈		1	3	54	29	372	4,27
X2.9	Α	KA	38	66 A	18	363	4,17
X2. ₁₀			6	34	47	389	4,47
Rata-rata Keseluruhan							4.19

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 87 responden yang diteliti. Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan pada E-SPT berada pada skor 4.19. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada

variabel E-SPT. Pada variabel E-SPT terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 4,59. Berada pada item pernyataan pertama. Responden penelitian ini terdiri dari siapa saja wajib pajak yang mendatangi kantor pelayanan pajak Makassar selatan pada waktu penelitian dilakukan. Sebagian besar pengusaha kena pajak mengatakan bahwa membayar pajak tepat waktu sangatlah penting sehingga harus dipenuhi setiap tahunnya.

3) Analisis Deskripsi Pernyataan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Tabel 4.10 Deskripsi Item Pernyataan <mark>Variab</mark>el Kepatuhan Wajib Pajak

DCSKI	Deskripsi item i ernyataan <mark>variab</mark> er kepatunan vvajib i ajak						
Jawaban	STS	TS	RG	S	SS	Total	Rata-rata
Responden			<u>'</u>	300			
Bobot	1	2	3	4	5		
Y. ₁			5	57	25	368	4,22
$Y_{\cdot 2}$			4	58	25	369	4,24
Y.3		5	7	49	26	357	4,10
Y.4		7	8	49	23	349	4,01
Y.5			2	32	53	399	4,58
	Rata-rata Keselruhan 92,76						

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 87 responden yang diteliti. Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan pada kinerja manajerial berada pada skor 92,76. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada variabel kepatuhan pengusaha kena pajak. Pada variabel kepatuhan pengusaha kena pajak terlihat bahwa indeks tertinggi kinerja manajerial terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 4,58. Berada pada item pernyataan kelima. Responden penelitian ini terdiri dari pengusaha kena pajak yang ditemukan di kantor

pelayanan perpajakan Makassar Selatan selama rentang waktu dilakukannya penelitian ini.

4) Analisis Deskripsi Variabel Gender

Tabel 4.11 Deskripsi Item Variabel Gender

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	46	52,1%
Perempuan	41	47,1%
Rata-rata keseluruhan		6,69%

Berdasarkan tabel 4.11 Menunjukkan bahwa jumlah terbanyak adalah pengusaha kena pajak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang dengan persentase 52,1%. Sedangkan pengusaha kena pajak yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 41 orang dengan presentasi 47,1%. Dari penelitian berdasarkan tabel diatas menunjukkan kecenderungan pengusaha kena pajak yang berjenis kelamin laki-laki untuk membayar pajak dibandingkan pengusaha kena pajak yang perempuan. Alasan lain, mengapa lebih cenderung pengusaha kena pajak laki-laki dibandingkan yang berjenis kelamin perempuan karena pada dasarnya pengusaha yang berjenis kelamin laki-laki memang cenderung lebih banyak dari perempuan.

C. Uji Kualitas Data M A K A S S A R

1. Uji Validitas

Uji validitas data merupakan prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengatur variabel penelitian valid dan tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila penyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersbut. Untuk mengetahui item

penyataan mempunyai r hitung > r tabel. Maka dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 87 responden dan besarnya df dapat di hitung 87-2= 85 denga df = 87 dan alpha= 0.79 maka r tabel = 0,2108. Jadi item pernyataan yang valid mempunyai r hitung > lebih besar dari 0,2352.

Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas

		•		
Variable	Item	r hitung	R table	Keterangan
E-Faktur	X1.1	0, 621	0,2108	Valid
	X1.2	0, 643	0,2108	Valid
	X1.3	0, 673	0,2108	Valid
	X1.4	0, 598	0,2108	Valid
	X1.5	0, 703	0,2108	Valid
	X1.6	0, 769	0,2108	Valid
	X1.7	0, 745	0,2108	Valid
	X1.8	0, 662	0,2108	Valid
	X1.9	0, 718	0,2108	Valid
	X1.10	0, 749	0,2108	Valid
E-SPT	X2.1	0, 686	0,2108	Valid
	X2.2	0, 752	0,2108	Valid
	X2.3 VER	SITA0,730_AM	N = 0.2108	Valid
	X2.4	0,712	0,2108	Valid
	X2.5	0,757	0,2108	Valid
	X2.6	0, 729	0,2108	Valid
	X2.7	0, 721	0,2108	Valid
	X2.8	0,719	0,2108	Valid
	X2.9	0, 686	0,2108	Valid
	X2.10	0, 595	0,2108	Valid
Kepatuhan PKP	Y.1	0, 775	0,2108	Valid
	Y.2	0,770	0,2108	Valid
	Y.3	0, 864	0,2108	Valid
	Y.4	0, 820	0,2108	Valid
	Y.5	0, 495	0,2108	Valid
	•			

Dari tabel 4.12 tersebut menunjjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan > r tabel hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap penyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan metode *Alpha Cronbach* yakni suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien keandalan realibilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilakukan pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Hasil Uii Reliabilitas

No	Variabel	Croncbach' Alpha	Keterangan
1	E-faktur	0855	Reliable
2	E-SPT	0,879	Reliable
3	Kepatuhan PKP	0,799	Reliable
	UNIVERSITAS	S ISLAM NEGER	

Tabel 4.13 menunjukkan nilai *Croncbach' Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60 sehinga dapat dikatakan bahwa istrumen dari kuesioner yang digunakan reliable untuk penjelasan variabel E-Faktur, E-SPT dan Kepatuhan PKP.

D. Uji Asumsi Klasik

Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang dilakukan dalam analisis

Regresi Linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas lakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak maka uji statistik yang dilakukan yaitu pengujian *one sample kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan denga nilai signifikan > 0,05. Pengujian nomalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yang histogram

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

						Unstand	lardiz	ed Residual	
N									87
Normal Parameters ^{a,b}	М	ean							,0000000
Normal Parameters	St	d. Devia	ation						1,75687544
	Al	osolute							,096
Most Extreme Differences	UP	ositive	SITA	S ISL	AM	NEGE	RI		,060
A	-N	egative		17					-,096
Kolmogorov-Smirnov Z									,893
Asymp. Sig. (2-tailed)		_/_					L		,403

a. Test distribution is Normal. A K A S S A R

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa data terdistibusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik kolmogorov-Smirnov. Dari tabel 4.14 dapat dilihat signifikansi nilai kolmogorov-

b. Calculated from data.

Smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,403. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistibusi normal.

Selanjutnya faktor lain yang digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik normal plot.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas - Grafik Normal Probability Plot

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa adanya titik-titik data yang tersebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal probability plot.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian Moltikolonealritas dapat dilihat dari *tolerance falue* dan *variance inpation factor* (VIF) sebagai berikut:

- a. Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat Multikolinearitas pada penelitian tersebut
- b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat
 Multikolinearitas pada penelitian tersebut

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics						
	Tolerance	VIF					
E-Faktur	,345	2,898					
E-SPT	,344	2,905					
Gender	,950	1,053					

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.15 diatas, nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10. Untuk variabel penjelasan variabel E-Faktur senilai 2,898, E-SPT 2,905, Gender senilai 1,053. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinerlitas antar variabel independen karena semua variabel memiliki nilai kecil dari 10. Hasil ini juga didukung oleh nilai *tolerance* juga menujukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Dimana variabel E-Faktur memiliki nilai tolerance senilai 0,345, E-SPT senilai 0,344, variabel gender senilai 0,950.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan recidual dari recidual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya Heteroskedasitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Sactter Plot*. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi trsebut bebas dari masalah heteroskedasitas. Hasil pengujian heteroskedasitas dengan metode *Sactter Plot* sebagai berikut

Scatterplot
Dependent Variable: Kepatuan PKP

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas- Grafik Scatterplot

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Scatter Plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titiktitik penyebaran secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedsitas. Pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja manajerial. Berdasarkan variabel E-Faktur, E-SPT, Kepatuhan PKP dan Gender.

Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas- Uji Glejser Coefficients^a

ı	Model	Unstandardize	ed Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1,977	1,303		1,517	,133
	E-Faktur	-,047	,052	-,166	-,908	,366
	E-SPT	,036	,048	,139	,759	,450
	Gender	-,392	,243	-,177	-1,610	,111

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

4. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode – t dengan kesalahan pada periode t – 1. Uji durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen . Hipotesis yang akan diuji adalah : Ho = tidak ada autokorelasi (r = 0), dan Ha = ada korelasi (r = 0) (Ghozali, 2006).

MAKASSAR

Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,28309
Cases < Test Value	43
Cases >= Test Value	44
Total Cases	87
Number of Runs	47
Z	,541
Asymp. Sig. (2-tailed)	,589

a. Median

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat runs test yang ditunjukkan oleh nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,589 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

E. Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 ,dan H2 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (E-Faktur dan E-SPT, sedangkan untuk menguji hipotesis H3 dan H4 menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan uji interaksi.

1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Peneltian H1 dan H2,

Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,693ª	,480	,468	1,78397

a. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Faktur

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.18 hal ini menunjukkan nilai *R Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,480 Hal tersebut menunjukkan bahwa 48,0% menyatakan bahwa kepatuhan pengusaha kena pajak dipengaruhi oleh E-Faktur dan E-SPT. Adapun sisanya yakni sebesar 52% yang dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

T<mark>abel 4.1</mark>9 Hasil Uj<mark>i F-Uji S</mark>imultan

ANOVA^a

Model		Su	m of Squares	df	Mea	n Square	F	Sig.
	Regression		247,079	2		123,539	38,818	,000 ^b
1	Residual		267,335	84		3,183		
	Total		514,414	86				

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP

b. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Faktur

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung yakni sebesar 38,818 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai F hitung (38,818) lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3.111 yang diperoleh dari df1=4-1=3 dan df2=87-2=85. Jadi E-Faktur dan E-SPT sama- sama berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

Tabel 4.20 Hasil Uji T -Uji Parsial Coefficients^a

Model		Unstandardize	ed Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3,019	2,096		1,441	,153
1	E-Faktur	,182	,081	,292	2,232	,028
	E-SPT	,253	,076	,437	3,338	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP

Berdasararkan tabel 4.20 di atas dapat di analisis model dimensi sebagai

berikut

Y = 3,019 + 0,182X1 + 0,253X2

Y = Kepatuhan PKP

 $X_1 = E$ -Faktur

 $X_2 = E-SPT$

a = Konstanta

b1 dan b2 = Koefisien Regresi

dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Nilai konstanta sebesar 3,019 mengindikasikan bahwa jika variabel inpenden (E-Faktur, dan E-SPT) adalah nol maka kepatuhan pengusaha kena pajak akan berjumlah sebesar 3,019.
- b) Koefisien regresi variabel E-Faktur (X1) sebesar 0,182 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu variabel E-Faktur maka akan meningkatkan kepatuhan pengusahasa kena pajak sebesar 0,182.

setiap kenaikan satu variabel E-SPT (X2) sebesar 0,253 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu variabel E-SPT maka akan meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,253.

Hipotesis yang diajukan akan diinterpretasikan berdasarkan hasil uji T atau uji parsial di atas. Hasil interpretasi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel E-Faktur memiliki nilai t hitung sebesar 2,232 lebih besar dari t tabel 1.988 (2,232 > 1,988) dengan probabilitas tingkat signifikan 0,028 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05 maka H1 diterima dan koefisien berpengaruh positif. Hal ini berarti E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila penggunaan E-faktur semakin meningkat maka kepatuhaan pengusaha kena pajak akan semakin meningkat.
- b. Berdasarkan pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel E-SPT memiliki nilai t hitung sebesar 3,338 lebih besar dari t tabel 1.989 (3,338>1,989) dengan probabilitas tingkat signifikan 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05 maka H2 diterima dan koefisien berpengaruh positif. Hal ini berarti E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila penggunaan E-SPT semakin meningkat dan lebih efisien maka kepatuhaan pengusaha kena pajak akan semakin meningkat.

2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Interaksi atau

Moderrated Regression Analysis (MRA) terhadap Hipotesis Penelitian

H3 dan H4.

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 ^a	,646	,624	1,49996

a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore: Gender, Zscore: E-Faktur, X1_M, Zscore: E-SPT

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.21 menunjukkan nilai *R square* dari model regresi moderasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel moderasi menjelaskan variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang didukung variabel moderasi. Dari tabel 4.21 diatas nilai *R square* sebeesar 0,646 atau 46,6% Hal ini berarti bahwa 46,6% kepatuhan pengusaha kena pajak dijelaskan oleh variabel E-Faktur, E-SPT dan Gender. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 4.22 Uji F- Uji Simultan

I ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	332,174	5	66,435	29,528	h
1	Residual	182,240	81	2,250		
	Total	514,414	86			

a. Dependent Variable: Kepatuan PKP

b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore: Gender, Zscore: E-Faktur, X1_M, Zscore: E-SPT

Hasil uji F pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 29,528 dengan probabilitas tingkat kesalahan lebih kecil dari tingkat signifikan yang diharapkan yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa E-Faktur, E-SPT dan Gender secara simultan mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak yang berada dalam wilayah kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

1. Regresi dengan Interaksi

Tabel 4.23 Hasil Uji t- Uji Parsial Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients				Stand	dardized	t	Sig.
						Coef	fficients		
		В		Std. E	rror	E	Beta		
	(Constant)	1	9,442		,327			59,478	,000
	Zscore: E-Faktur		,778		,276	ı	,318	2,821	,006
1	Zscore: E-SPT		1,141		,279		,467	4,088	,000
'	Zscore: Gender		-,259		,169		-,106	-1,535	,129
	X1_M		,725		,358		,213	2,026	,046
	X2_M		,713		,340		,222	2,098	,039

a. Dependent Variable: Kepatuan PKP

Berdasarkan pada Tabel 4.23 di atas hasil interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian ($H_{3. dan} H_4$) dapat dilihat sebagai berikut:

a. Hasil uji MRA yang tersajikan pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa variabel moderating X1M memiliki t hitung > t tabel, yaitu t hitung sebesar 2,026 sementara pada t tabel yakni sebesar 1.98861 tingkat signifikansi 0,046 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel gender merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan variabel E-Faktur

- terhadap variabel kepatuhan pengusaha wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Oleh karena itu hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima.
- b. Hasil uji MRA yang tersajikan pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa variabel moderating X2M memiliki t hitung > t tabel, yaitu t hitung sebesar 2,098 sementara pada t tabel yakni sebesar 1.989 tingkat signifikansi 0,039 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel gender merupakan variabel yang mampu memoderasi variabel E-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H₄) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima.

F. Pembahasan Penelitian

Tabel 4.24 Akumulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan	Hipotesis diterima
	pengusaha kena pajak	
H2 A	E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan	Hipotesis diterima
	pengusaha kena pajak	
НЗ	Diduga gender mampu memoderasi pengaruh E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Hipotesis diterima
H4	Diduga gender mampu memoderasi pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	Hipotesis diterima

1. Pengaruh E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah E-Faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya E-Faktur berpengaruh positif dan signifkan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, artinya hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemakaian E-Faktur dan semakin baik penerapannya dalam sebuah instansi maka kepatuhan wajib pajak khususnya pengusaha kena pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa dengan adanya E-Faktur sangat membantu dalam peningkatan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menunaikan kewajibannya. Sistem E-Faktur Pajak atau pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemudahan PKP dalam melaporkan pajaknya, juga untuk menghindari potensi kecurangan dalam pelaporan pajak yang ditanggungnya dan juga sebagai langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan yang telah dicanangkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustapha dan Obid (2015), yang menyatakan ada hubungan positif yang signifikan antara kualitas layanan pajak dan sistem pajak online. Hubungan antara kualitas layanan pajak dan persepsi kemudahan penggunaan juga signifikan secara statistik dengan nilai 0,93 dan kemudahan yang dirasakan penggunaan memiliki statistic positif dengan sistem pajak online pada nilai signifikan 0.61. Hal ini sejalan pula dengan Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah model yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mampu

memprediksi persepsi pengguna terkait manfaat dan kemudahan dalam menggunakan untuk menentukan sikap terhadap penerapan teknologi Informasi (Yudi & Tambotoh, 2013).

Davis et al (1989) menyusun model Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan model konseptual dari penerimaan pengguna terhadap sistem informasi teknologi atau teknologi baru. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan adaptasi dari model Theory of Reasoned Action (TRA) yang secara khusus dirancang untuk model penerimaan penggunaan sistem informasi.

2. Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah E-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya E-SPT berpengaruh positif dan signifkan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, artinya hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemakaian dan pemahaman serta keefektifan penggunaan E-SPT maka akan mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer (Diana dan Setawati, 2004: 9). Tujuan dari E-SPT

adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan Wajib Pajak dan mempermudah pelaporan SPT.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Falerian R.A Tamboto (2013) menunjukkan bahwa penerapan E-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai layanan perpajakan bentuk peningkatan kualitas salah satunya dengan dikembangkannya pelaporan pajak dengan menggunakan elektronik pajak seperti E-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak). Penerapan e-SPT tidak terlepas dari berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan E-SPT dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi (Sari dkk, 2014).

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan E-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Napitupulu, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2017) menyimpulkan bahwa adanya E-SPT, pelaporan SPT-Masa PPN menjadi lebih cepat, akurat serta dapat menghemat biaya dan waktu. Penelitian ini sejaaalan pula dengan Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory) dimana Moral perpajakan (tax morale) diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk kepatuhan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-

barang publik (Torgler & Schneider, 2005). Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan.

3. Gender Memoderasi Hubungan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah gender memoderasi hubungan E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa *gender* memoderasi pengaruh E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, artinya hipotesis diterima. Hipotesis dalam penelitian ini dimana gender memoderasi E-Faktur dimana memiliki nilai signifikan 0,046 lebih lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemakaian dan pemahaman serta keefektifan penggunaan E-Faktur maka akan mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak.

Menurut Purwono (2010: 284), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Undang-undang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. Sejalan dengan mekanisme pemungutan yang ada dalam PPN, faktur pajak dibuat oleh pihak yang

memungut PPN yaitu yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau dibedakan dengan faktur penjualan.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: (1) penyerahan Barang Kena Pajak; (2) penyerahan Jasa Kena Pajak; (3) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau (4) ekspor Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan. Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hak ini sejalan pula dengan theory TAM yang di dalamnya membahas mengai teknologi.

Gender sendiri adalah perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan dari Tuhan, diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Gender dibagi menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga responden dari penelitian ini menggunakan pegawai/karyawan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Coate & Frey (2000 dalam Dharma 2016), terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap

pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Tidak Sejalan dengan Dharma (2016), perbedaan gender mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Astuti dan Panjaitan (2017) menyimpulkan bahwa e-Faktur memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

4. Gender Memoderasi Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah gender memoderasi hubungan E-SPT tehadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa gender memoderasi pengaruh E-SPT tehadap kepatuhan pengusaha kena pajak, artinya hipotesis keempat diterima. Hipotesis dalam penelitian ini dimana gender memoderasi E-SPT dikatakan diterima dimana memiliki nilai signifikan 0,039 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis dikatakan diterima.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan eSPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer (Diana dan Setawati, 2004: 9)

Penelitian yang dilakukan oleh Dyanrosi (2015) tentang pengaruh jenis kelamin (gender) terhadap persepsi kemudahan penggunaan (perceived easy of use) sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disebut dengan

e-filing diperoleh hasil koefisien jalur sebesar 0.085. Koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa pengaruh jenis kelamin terhadap persepsi kemudahan penggunaan adalah berbanding lurus. Nilai t-hitung yang diperoleh adalah 0,909<ttabel yaitu 1.98, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan berbeda dengan penelitian yang mendapatkan hasil sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merasakan kemudahan dalam menggunakan e-filing. Membahas mengenai penggunaan lemajuan teknologi dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak serta kemudahannya, maka sejalan dengan theory Model TAM yang mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk menjelaskan pengguna yang mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna. Ciri khas dari Model TAM adalah sederhana namun bisa memprediksi penerimaan maupun penggunaan teknologi (Fatmawati, 2015). Technology acceptance model (TAM) ini menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan sesuatu didorong oleh dua faktor yaitu behavior beliefs dan Normatif beliefs.

Studi yang dilakukan oleh Hakim (2016) untuk menganalisis model penerimaan pengguna yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan e-SPT dan e-Filing menyimpulkan bahwa adanya perbedaan model penerimaan antara masing-masing kelompok jenis kelamin. Hal ini disebabakan karena, pria pada umumnya lebih berorientasi tugas (task oriented) dibanding wanita, sehingga tingkat kemanfaatan dan penyelesaian tugas relatif lebih kuat daripada

wanita. Sedangkan wanita kemungkinan lebih berorientasi proses (process oriented) sehingga usaha yang dikeluarkan untuk mempelajari sesuatu memiliki efek yang lebih kuat dibanding pria. Menurut Ningrum dkk (2018),keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dan direksi (gender) dapat memperkuat pengaruh corporate social responsibility (CSR) dengan tax avoidance.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh E-Faktur dan E-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dengan gender sebagai variabel moderasi.

- 1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai E-Faktur, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) Makassar Selatan.
- 2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi penggunaan E-SPT maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) Makassar Selatan.
- 3. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa gender mampu memoderasi pengaruh E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan jenis kelamin (gender) mampu mempengaruhi hubungan E-Faktur dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang berada di KPP Pratama Makassar Selatan.

4. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa gender mampu memoderasi pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan jenis kelamin (gender) mampu mempengaruhi hubungan E-SPT dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang berada di KPP Pratama Makassar Selatan.

B. Keterbatasan Penelitian

- Pembagian kuesioner yang terbilang memiliki rentang waktu yang cukup lama yang disebabkan oleh tidak menentunya pengusaha kena pajak dalam mengisi kuesioner dalam sehari sehingga menyebabkan lamanya pengumpulan data dalam penelitian ini.
- Dari sekian banyaknya pengusaha kena pajak yang berada dalam pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan hanya 87 orang yang bersedia mengisi kuesioner.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

C. Saran

- 1. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan adanya basis IT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajibannya.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas lagi populasi penelitian sehingga mendapatkan penelitian yang hasilnya bersifat umum

dan menjadi acuan penelitian. Selain itu, bagi peneliti diharapkan dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak serta mencari variabel lain yang dapat dijadikan sebagai variabel moderasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiputra, M. W. 2015. Aplikasi Technology Acceptance Model terhadap Pengguna Layanan Internet Banking. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 2(1): 52-63.
- Alfioreta, N., Purnawati, I., Kartika. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada pengusaha Kena pajak yang Terdaftar menggunakan E-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1-6.
- Andrayuga, K.A.S., Sulindawati, N.L.G.E., Sujana, E. 2017. Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada KPP Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8 (2).
- Andriani, F. D., Napitupulu, T. A., Haryaningsih, S. 2017. The User Acceptance Factors of e-Filing System in Pontianak. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95 (17): 4265-4272.
- Angraini, Y., Ompusunggu, A.P., Darmansyah. 2017. Pengaruh Pelayanan Konseling dan penerapan E-Faktur terhadap Penerimaan Pajak, Pemidiasi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6 (11): 31-44.
- Aryani, F. 2017. Persepsi Pengusaha Kena pajak (PKP) tentang Penerapan e-SPT Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Kemudahan Pelaporan SPT-Masa PPN pada KPP Pratama Sekayu. *Jurnal Ilmiah Ekonomika*, 10 (1): 140-160.
- Asraf. 2015. Analisis Perilaku Patuh Membayar Pajak pada Wajib Pajak di Kabupaten Pasaman Barat dengan Aplikasi Theory of Planned Behavior. *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 3 (2): 61-74.
- Astuti, A. N. P & Panjaitan, I. 2017. Pengaruh E-Faktur dan Pengetahuan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2 (1): 1-13.
- Azmi, A. C. & Bee, N. L. 2010. The Acceptance of the e-Filing System by Malaysian Taxpayers: A Simplified Model. *Electronic Journal of e-Government*, 8 (1):13-22.

- Basuki, A. T. & Prawoto, Nano. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapai Aplikasi SPSS & EVIEWS*). Jakarta: Rajawali Pers.
- Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, 15 (2): 161-177.
- Davis, F. D., R. P. Bagozzi, dan P. R. Warshaw. 1989. User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8): 982-1003.
- Devano, S. & Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dharma, L. 2016. Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, 3 (1): 1565-1578.
- Diana, A. & Setiawati, L. 2004. *Perpajakan IndonesiA*, *Konsep*, *Aplikasi*, *dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
- Dyanrosi, A. 2015. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Minat Perilaku Menggunakan E-Filing. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4 (2): 361-365.
- Fatmawati, E. 2015. Technology Acceptance Model (TAM) untuk Menganalisis Penerimaan terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal Iqra*, 09(01): 1-13.
- Ferdiawan, E., Kertahadi., Ismono, B. 2015. Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6 (2): 1-10.
- Fida, A & Widyaningsih, A. 2017. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding Profesionalisme Akuntansi Menuju Sustainable Business Practice*, Bandung, 20 Juli 2017 Universitas Widyatama.

- Hakim. M. M. 2016. Analisis Model Penerimaan Pengguna Sistem Pelaporan Pajak Online. *Jurnal SIMETRIS*, 7 (1) 365-372.
- Hapsari, W. D. 2014. Analisis Penerapan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10 (10): 36-48.
- Husnurrosyidah & Suhadi. 2017. Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 1 (1): 97-106.
- Jayanto, P. Y. 2011. Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2 (1): 48-61.
- Kader, M. K., Sabijono, H., Wokas, H.R.N. 2015. Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) terhadap Efisiensi Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib pajak di Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15 (4): 63-73.
- Komala, K.C., Suhadak., Endang, M.G.W. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2 (1).
- Kumar, S., Gupta, S. 2017. A Study on Income Tax Payers Perception Towards Electronic Filing. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 22 (57): 1-14.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Lingga, S. I. 2012a. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 4 (1): 70-86.
- Lingga, S. I. 2012b. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2): 101-114.
- Lintang, Kevin., Kalangi, Lintje., Pusung, Rudy. 2017. Analisis Penerapan e-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 5 (2): 2023-2032.

- Lu, C. T., Huang, S. Y., Lo, P. Y. 2010. An Emprical Study of on-line Tax Filing Acceptance Model: Integrating TAM and TPB. *African Journal of Bussiness Management*, 4 (5): 800-810.
- M, Jamaluddin. 2011. Pengantar Perpajakan. Makassar : Alauddin Press.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Morissan, M. A. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.
- Mustapha, B., Obid, S. N. B. S. 2015. Tax Service Quality: the Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. Procedia Social and Behavioral Sciences: 2-9.
- Napitupulu, B. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis Teknologi Informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (1): 40-55.
- Ningrum, A. K., Eny, S., Achmad, S. H. A. 2018. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *Balance*, 15 (1): 63-71.
- Purwono, H. 2010. Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Puspitawati, H. 2010. Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik pada Mahasiswa IPB. *Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto*, 5 (1): 17-34.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
- Putarta, P & Sayekti, F. 2016. Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 09(03): 196-209.
- Rahmanto, S. 2015. Manfaat Pajak Ditinjau dari Teori Hukum Positive. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 8 (2): 144-154.
- Rais, M. M & Sherly, P. 2015. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT Terhadap Pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3 (1): 542-552.*
- Saragih, H. 2017. Pengaruh Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur menggunakan Sistem e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Memenuhi

- Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Studi Kasus di KPP Pratama Medan Timur. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Sarah, V.A. & Sandra, A. 2016. Analisis Pemberlakuan E-Faktur PPN pada PT. ABC. *Jurnal Akuntansi*, 5(2): 113-125.
- Sari, N.P., Kertahadi, Endang, M.G.W. 2014. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus pada KPP Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2 (1).
- Sa'adah, S. M., Suparman, L., Basuki, P. 2018. The Determination of Tax Compliance Government Treasurer in Mataram, Indonesia. *International Journal of Arts and Commerce*, 7 (1): 36-48.
- Setyawan, A. D. 2014. Hipotesis. Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Surakarta.
- Setyonugroho, H., Sardjono, B. 2013. Factors Affecting Willingness to Pay Taxes on Individual Taxpayers at Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office. *The Indonesian Accounting Review*, 3 (1): 77-88.
- Sinambela, S. D., Ariswoyo S., Sitepu, H. R. 2014. Menentukan Koefisien Determinasi antara Estimasi dengan Type Welsch dengan Least Trimmed Square dalam Data yang Mempunyai Pencilan. *Santia Matematika*, 2(3): 225-235.
- Sondakh, J. J. 2017a. Acceptance of e-Tax Service System: A Confirmatory Factor Analysis. *The International Journal of Business & Management*, 5 (6): 163-171.
- Sondakh, J. J. 2017b. Behavorial Intention to Use e-Tax Service System: An Application of Technology Acceptance Model. *Eouropean Research Studies Journal*, 20 (2A): 48-64.
- Suharsaputra, Unhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhartanto, R.A., & Morasa, J. 2015. Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 3 (2): 94-102.
- Sukardji, Untung. 2002. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Suryadi, Dedy. 2016. Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung. *TEDC*, 10 (1): 61-69.
- Syamsiah, Nur. 2014. Wacana Kesetaraan Gender. Sipakalebbi', 1(2): 265-301.
- Tamboto, R. A. Falerian. 2013. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT PPN Menurut Ersepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 1 (4): 2059-2068.
- Tindagi, R & Morasa, J. 2014. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal EMBA*, 2(2): 1067-1076.
- Torgler, Benno & Schneider, Friedrich. 2005. Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis. *Empirica*, 32: 231-250.
- Turmudi, Muhamad. 2015. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat. Jurnal Al-Adl, 8(1): 128-142.
- Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uyanto, Stanislaus, S. 2009. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Wang, Y. S. 2002. The Adoption of Electronic Tax Filing Systems : an Emprical Study. *Government Information Quarterly* 20, 333-352.
- Yasa, I.N.P. 2016. Penerapan E-Faktur dan Persepsi Pengusaha Kena pajak (PKP) (Studi pada Pengusaha Kena pajak di kabupaten Buleleng). *Jurnal Riset Akuntansi*, 6 (4): 79-84.
- Yudi, S. E. & Tambotoh J. J. C. 2013. Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Menggunakan Penekatan Innovation and Diffusion Theory (IDT) dan Technology Acceptance Model (TAM). *SENSAKOM*. 181-187.





KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor

COTO /EB.I/PP.00.9/10/2019

Gowa, 16 Oktober 2019

Sifat

: Penting

Lampiran:

Perihal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada,

Yth. Kanwil DJP Sulawesi Selatan

Di,-

Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama

: Muh. Akbar Amin

NIM

: 10800113173

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan

: Akuntansi

Semester Alamat

: XIII (Tiga Belas) : Perum Grand Aroepala Blok J No. 17, Jln. Tamangapa Raya Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

"Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

UNIVERSI Makassar Selatan) "EGERI

Dengan Dosen pembimbing:

1. Jamaluddin M, SE., M.Si.

2. Andi Wawo, SE., Akt.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

lekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Alaundin Makassac

Abustani Ilyas, M.Ag.

P-19661130 199303 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232 TELEPON (0411)456132; 425220[HUNTING]; FAKSIMLE (0411)456131 SITUSwww.peiak.og.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200; EMAIL pengaduan到pajak.go.id, Informasi@peiak.go.id

NOTA DINAS

Nomor: ND-729/WPJ.15/BD.05/2019

Yth

: Kepala KPP Pratama Makassar Selatan

Dari

: Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

Sifat : Biasa

Hal

: Persetujuan Izin Penelitian

Tanggal: 29 November 2019

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor: 5010/EB.I/PP.00.9/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penerusan Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama

: Muh. Akbar Amin

MIM

: 10800113173

Program Studi

Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenjang Program : Strata Satu (S1)

Judul Penelitian

: Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi

Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan);

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di Kepala KPP Pratama Makassar Selatan sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft copy hasii riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Eko Pandoyo Wisnu Bawono



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I: Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923 Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor Lampiran Hal 1860 / EB.I/PP.00.9/6/2019

Samata, 27 Juni 2019

: Undangan Seminar Proposal

A.n. Muh. Akbar Amin/10800113173

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing

D

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing, untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing dan penguji pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal

: Senin, of Juli 2019

Waktu

: 08.30 -12.00 WITA

Judul Skripsi

: Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan

Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar)

Tempat

: Ruang Seminar

Tempar . Tempar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

ALAU

Wassalam,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Assse, M.Ag. NIP. 19581022 198703 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir

Pembimbing diharapkan hadir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923 Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor: 95 7 /EB.1/PP.00.9/2/2020

Sifat : Penting

Lamp :-

Hal : Undangan Seminar Hasil

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama

: Muh. Akbar Amin

NIM

: 10800113173

Jurusan

: AKUNTANSI

Judul Skripsi

: Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan

Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Varlabel

Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota

Makassar)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal

; Selasa, 18 Februari 2020

Waktu

Tempat

UNI Ruang Seminar SLAM NEGERI

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Wassalam, Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Samata,13 Februari 2020

Abustani Ilyas, M.Ag. NIP-19661130 199303 1 003

Catatan:

Pembimbing dan Penguji berpakaian: - Laki-laki : Kemeja dan Berdasi / Batik

- Wanita : Menyesuaikan





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus 1: Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923

Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sunggurninasa – Gown Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor: 1305 /EB.1/PP.00.9/2/2020

Samata, #4 Februari 2020

Sifat : Penting

Lamp :-

Hal: Undangan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan harmat, kami men<mark>gundang</mark> Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian

Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Muh. Akbar Amin NIM : 10800113173

Jurusan : AKUNTANSI

Judul Skripsi : "Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Varlabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kota Makassar)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal ; Karnis, 27 Februari 2020

Waktu : 13.00 - 15.30 Wita Tempat : Ruang Seminar

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Wassalam

Dekan

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

Catatan:

Pembimbing dan Penguji berpakalan:

- Laki-laki : Kemeja dan Berdasi / Batik
- Wanita : Menyesuaikan

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
MUH. AKBAR AMIN
M A NIM: 10800113173 A R

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

KUESIONER PENELITIAN

A. Identitas Responden (Wajib diisi keseluruhan)

Nama Lengkap

No. NPWP

Jenis Kelamin

Nama Usaha

Lama dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pendidikan formal terakhir

Usia

Alamat

No. Handphone

B. Petunjuk Pengisian:

- 1. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini dan tidak ada kaitannya dengan penilaian kerja Bapak/Ibu.
- 2. Jawablah kuesioner ini dengan objektif, sesuai dengan kenyataan yang ada.
- 3. Tuliskan jawaban atau pendapat Bapak/Ibu pada kolom jawaban yang telah disediakan atau dengan memberi tanda ceklis () pada pilihan yang sesuai.

C. Keterangan Pilihan Jawaban:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RG = Ragu-ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

D. Daftar Pernyataan:

Nomor 1-10 merupakan pernyataan mengenai E-Faktur. Pilihlah jawaban dibawah ini sesuai dengan yang telah anda lakukan.

No.	Item Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Penggunaan E-Faktur lebih efisien dan efektif					
	dibandingkan secara manual.					
2	Mempelajari cara penggunaan E-Faktur adalah mudah.					
3	Saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam					
	menggunakan E-Faktur.					
4	E-Faktur memudahkan saya dalam pelaporan masa pajak					
	PPN.					
5	Sering terjadinya penyalahgunaan faktur pajak, dapat					
	diminimalisir dengan adanya aplikas <mark>i E-Fakt</mark> ur.					
6	E-Faktur dilengkapi dengan QR-Code sehingga saya					
	memperoleh perlindungan terhadap penyalahgunaan faktur					
	pajak yang tidak sah.					
7	E-Faktur bermanfaat praktis bagi saya, karena dapat					
	memperoleh nomor seri faktur pajak tanpa perlu datang ke					
	Kantor Pelayanan Pajak (KPP).					
8	Membuat E-Faktur lebih mudah karena tidak perlu					
	melakukan instalasi manual aplikasi E-Faktur karena sudah					
	terdapat secara online pajak berbasis web.					
9	Proses korespondensi antara Kantor Pelayanan Pajak					
	(KPP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat lebih cepat					
	dilakukan karena pengecekan E-Faktur bisa dilakukan					
	secara online.					
10	Terhindar dari E-Faktur yang tidak lengkap karena semua					
	data E-Faktur langsung terverifikasi oleh Direktorat					
	Jenderal Pajak (DJP).					

Nomor 11-20 merupakan pernyataan mengenai E-SPT. Pilihlah jawaban dibawah ini sesuai dengan yang telah anda lakukan.

No.	Item Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
11.	Saya merasa lebih terbantu menggunakan SPT secara					
	elektronik dibandingkan dengan secara manual					

No.	Item Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
12.	Kesalahan dalam pengisian dan perhitungan SPT, tidak					
	dapat lagi diminimalisir dengan sistem SPT manual.					
13.	Saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam					
	menggunakan E-SPT					
14.	E-SPT memudahkan bagi saya karena dapat dilakukan					
	kapan saja (24 jam sehari dan 7 hari seminggu termasuk					
	hari libur) dan dapat dilakukan di mana saja yang memiliki					
	jaringan internet.					
15.	Penyampaian E-SPT dapat dilakukan secara cepat dan					
	aman karena lampiran dapat dalam bentuk CD/Flashdisk.					
16.	Dengan adanya E-SPT, data perpajakan Wajib Pajak dapat					
	terorganisasi dengan baik dan sistematis					
17.	Sistem E-SPT meminimalisir kesalahan yang sering terjadi					
	dalam pengisian dan perhitungan sec <mark>ara man</mark> ual					
18	Sistem E-SPT memberikan kemudahan dalam laporan					
	pajak.					
19	Data-data yang disampaikan melalui E-SPT lebih lengkap					
	dan sistematis karena penomoran formulir menggunakan					
	sistem komputer.					
20	E-SPT merupakan aplikasi yang ramah lingkungan, karena					
	tidak boros kertas.					

Nomor 21-25 merupakan pernyataan mengenai kepatuhan anda selaku Pengusaha Kena Pajak. Pilihlah jawaban dibawah ini sesuai dengan yang telah anda lakukan.

No.	Item Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
21	Selaku Pengusaha Kena Pajak, saya selalu membayar Pajak					
	Pertambahan Nilai (PPN) setiap akhir bulan, bulan					
	berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak					
22	Selaku Pengusaha Kena Pajak, saya selalu melaporkan SPT					
	Masa PPN setiap akhir bulan, bulan berikutnya setelah					
	berakhirnya Masa Pajak					
23	Selaku Pengusaha Kena Pajak, saya tidak pernah					
	mempunyai tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin					
	untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak					

No.	Item Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
24	Selaku Pengusaha Kena Pajak, saya tidak pernah					
	mendapatkan surat teguran baik karena sanksi maupun tunggakan pajak					
25	Aplikasi E-SPT dan E-Faktur memberikan saya kemudahan					
	dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					



LAMPIRAN 2

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

NO	JENIS		E-FAKTUR SI										SWOD
NO	KELAMIN	KODE	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10	SKOR
1	PR	0	5	2	2	5	4	4	4	4	4	4	38
2	PR	0	5	2	2	4	4	3	4	4	4	4	36
3	PR	0	5	4	2	3	4	4	4	4	4	4	38
4	PR	0	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	46
5	PR	0	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
6	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	PR	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
8	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	PR	0	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	39
10	PR	0	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
11	PR	0	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
12	PR	0	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43
13	PR	0	5	4	3	5	4	4	5	5	5	5	45
14	PR	0	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	41
15	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
16	PR	0	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
17	PR	0	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	45
18	PR	0	5	5	2	5	4	4	4	5	4	4	42
19	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	PR	0	5	UN4VE	R4IT	AS4SL	ANS N	EGÆR	4	4	4	4	42
21	PR	0	5	4	4	5	5	4	-4	4	4	4	43
22	PR	0	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
23	PR	0	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
24	PR	0	5	M4 A	3	A4 S	4	A4	4	4	5	4	41
25	PR	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
26	PR	0	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
27	PR	0	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
28	PR	0	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	46
29	PR	0	4	4	2	4	3	4	5	2	4	4	36
30	PR	0	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
31	PR	0	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	39
32	PR	0	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	46

NO	JENIS						E-FA	KTUR					swop.
NO	KELAMIN	KODE	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10	SKOR
33	PR	0	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	40
34	PR	0	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	47
35	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	PR	0	5	4	2	5	5	5	5	4	4	4	43
37	PR	0	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4	41
38	PR	0	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
39	PR	0	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
40	PR	0	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	37
41	PR	0	4	3	2	4	4	3	4	4	4	4	36
42	LK	1	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	37
43	LK	1	5	4	2	5	4	4	4	4	4	4	40
44	LK	1	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	40
45	LK	1	4	2	2	-4	4	2	4	4	4	4	34
46	LK	1	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	44
47	LK	1	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
48	LK	1	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
49	LK	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
50	LK	1	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43
51	LK	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
52	LK	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
53	LK	1	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	47
54	LK	1	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
55	LK	1	5	4./	D ZIT	464	.4	4	4	4	4	4	39
56	LK	1	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	44
57	LK	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
58	LK	1	-5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	39
59	LK	1	5	4	<u>4</u> 5	5	5	5	5	5	4	4	46
60	LK	1	5	M_5 A	5	A_5	5	$A_5 H$	5	5	5	5	50
61	LK	1	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	44
62	LK	1	5	4	2	4	5	5	5	5	5	5	45
63	LK	1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
64	LK	1	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
65	LK	1	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	43
66	LK	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
67	LK	1	4	4	2	5	3	4	4	5	4	4	39
68	LK	1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49

NO	JENIS	KODE		E-FAKTUR S											
NO	KELAMIN	KODE	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10	SKOR		
69	LK	1	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	46		
70	LK	1	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	46		
71	LK	1	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37		
72	LK	1	4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	40		
73	LK	1	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	36		
74	LK	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38		
75	LK	1	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38		
76	LK	1	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38		
77	LK	1	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	37		
78	LK	1	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38		
79	LK	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		
80	LK	1	4	5	2	4	5	4	4	5	4	4	41		
81	LK	1	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	39		
82	LK	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40		
83	LK	1	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38		
84	LK	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39		
85	LK	1	4	2	2	4	4	3	4	4	4	4	35		
86	LK	1	4	3	2	4	4	3	4	4	4	4	36		
87	LK	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



	JENIS						E-	SPT					
NO	KELAMIN	KODE	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2. 10	SKOR
1	PR	0	5	4	2	5	4	4	4	4	4	5	41
2	PR	0	5	3	2	4	4	4	4	4	4	4	38
3	PR	0	5	4	2	4	4	4	4	4	4	5	40
4	PR	0	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	47
5	PR	0	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
6	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	PR	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
8	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	PR	0	5	4	2	4	4	4	4	4	4	5	40
10	PR	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
11	PR	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
12	PR	0	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	45
13	PR	0	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	47
14	PR	0	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	46
15	PR	0	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	44
16	PR	0	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	45
17	PR	0	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	44
18	PR	0	5	4	2	5	5	5	4	4	4	5	43
19	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	PR	0	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	45
21	PR	0	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
22	PR	0	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
23	PR	0	5	4	/EBSI	TAS 19	4	NEGE	4	5	4	5	45
24	PR	0	5	4	3	5	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	4	4	4	5	44
25	PR	0	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	45
26	PR	0	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	45
27	PR	0	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42
28	PR	0	5	4	A_4K	5	555	4	K 5	4	4	5	45
29	PR	0	4	3	5	4	4	4	4	5	4	4	41
30	PR	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
31	PR	0	5	4	2	4	4	4	4	3	4	3	37
32	PR	0	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	47
33	PR	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
34	PR	0	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	46
35	PR	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	PR	0	4	2	2	4	4	3	4	4	4	5	36

	JENIS			E-SPT S										
NO	KELAMIN	KODE	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2. 10	SKOR	
37	PR	0	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	44	
38	PR	0	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38	
39	PR	0	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	37	
40	PR	0	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38	
41	PR	0	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	35	
42	LK	1	5	4	2	4	3	4	4	4	4	5	39	
43	LK	1	4	4	3	5	4	4	4	3	4	3	38	
44	LK	1	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	41	
45	LK	1	4	3	2	4	4	5	4	4	4	4	38	
46	LK	1	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	45	
47	LK	1	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	47	
48	LK	1	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	46	
49	LK	1	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	44	
50	LK	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49	
51	LK	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49	
52	LK	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
53	LK	1	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48	
54	LK	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	
55	LK	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4	5	38	
56	LK	1	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	46	
57	LK	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39	
58	LK	1	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	39	
59	LK	1	5	3	4	5	5	5	4	5	3	3	42	
60	LK	1	5	5	ERSI	IAS IS	SLAM 5	NEGE 5	5	5	5	5	50	
61	LK	1	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	45	
62	LK	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	
63	LK	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
64	LK	1	4	3	A ₄ K	3	545	4	K 4	4	4	4	38	
65	LK	1	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	41	
66	LK	1	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	40	
67	LK	1	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	47	
68	LK	1	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	46	
69	LK	1	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	47	
70	LK	1	5	3	4	5	5	5	4	5	3	3	42	
71	LK	1	3	4	2	2	3	4	3	2	3	4	30	
72	LK	1	4	3	3	4	4	4	4	5	4	3	38	

NO	NO JENIS KODE E-SPT											CKOD	
NO	KELAMIN	KODE	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2. 10	SKOR
73	LK	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	37
74	LK	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	39
75	LK	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	37
76	LK	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	39
77	LK	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	37
78	LK	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	37
79	LK	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
80	LK	1	5	4	2	5	4	4	4	5	4	3	40
81	LK	1	4	4	2	5	4	4	4	5	4	5	41
82	LK	1	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38
83	LK	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4	5	38
84	LK	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
85	LK	1	4	3	2	4	3	4	4	4	4	4	36
86	LK	1	4	3	2	4	4	4	3	3	4	4	35
87	LK	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



NO	JENIS KELAMIN	KODE	ENA	SKOR				
	KELAWIIV		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	PR	0	4	4	4	4	4	20
2	PR	0	3	3	4	3	4	17
3	PR	0	4	4	4	2	5	19
4	PR	0	5	5	5	5	5	25
5	PR	0	4	4	4	4	5	21
6	PR	0	4	4	4	4	4	20
7	PR	0	4	4	4	4	5	21
8	PR	0	4	4	4	4	4	20
9	PR	0	4	4	4	4	5	21
10	PR	0	4	4	2	2	5	17
11	PR	0	4	4	2	2	5	17
12	PR	0	5	5	5	5	5	25
13	PR	0	5	5	-1-5	5	5	25
14	PR	0	5	5	5	5/	4	24
15	PR	0	4	4	5	5	5	23
16	PR	0	4	4	4	4	5	21
17	PR	0	5	5	5	5	5	25
18	PR	0	4	4	5	5	5	23
19	PR	0	4	4	4	4	4	20
20	PR	0	5	5	5	5	5	25
21	PR	0	4	4	4	4	5	21
22	PR	0	5	_5	5	5	5	25
23	PR	OUN	IIVĘRS	SITAS	ISI ₅ AN	NEG	ER ₅	24
24	PR	0	5	5	5	5	5	25
25	PR	0	5	5	5	5	5	25
26	PR	0	5	5	5	5	5	25
27	PR	0 🗸	4	4.4	4	5 5 A	5	22
28	PR	0	5	5	5	4	5	24
29	PR	0	3	3	2	3	5	16
30	PR	0	4	4	2	2	5	17
31	PR	0	4	4	4	4	4	20
32	PR	0	5	5	5	5	5	25
33	PR	0	4	4	2	2	5	17
34	PR	0	5	5	5	5	5	25
35	PR	0	4	4	4	4	4	20

NO	JENIS KELAMIN	KODE	KEPA	ATUHAN	PENGU PAJAK	SAHA K	ENA	SKOR
	KELAWIIV		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
36	PR	0	5	5	4	2	4	20
37	PR	0	4	4	5	4	5	22
38	PR	0	4	3	3	4	4	18
39	PR	0	4	4	4	3	4	19
40	PR	0	4	4	4	3	4	19
41	PR	0	4	4	3	3	4	18
42	LK	1	4	4	4	4	5	21
43	LK	1	4	5	4	4	4	21
44	LK	1	4	4	5	4	4	21
45	LK	1	4	4	4	4	5	21
46	LK	1	4	4	4	4	5	21
47	LK	1	5	5	4	4	5	23
48	LK	1	4	4	4	4	5	21
49	LK	1	4	4	4	4/	5	21
50	LK	1	4	4	4	4	5	21
51	LK	1	5	5	5	5	5	25
52	LK	1	5	5	5	5	5	25
53	LK	1	4	4	4	4	5	21
54	LK	1	3	4	3	2	4	16
55	LK	1	4	4	4	4	5	21
56	LK	1	4	4	4	4	5	21
57	LK	1	4	4	4	4	4	20
58	LK	1 ^{UN}	IIV Ę RS	SITAS	ISI ₄ AN	I NÆG	ER4	20
59	LK	1	5	4	3	4	5	21
60	LK	1	5	5	5	5	5	25
61	LK	1	4	4	4	4	5	21
62	LK	1 1	4	44	5	5A	5	23
63	LK	1	5	5	5	5	5	25
64	LK	1	3	4	3	5	4	19
65	LK	1	4	4	4	4	4	20
66	LK	1	4	4	4	4	4	20
67	LK	1	3	5	4	4	4	20
68	LK	1	5	5	5	4	5	24
69	LK	1	5	4	5	4	5	23
70	LK	1	5	4	3	4	5	21

NO	JENIS KELAMIN	KODE	KEPA	SKOR				
	KELAWIIN		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
71	LK	1	5	5	4	3	3	20
72	LK	1	4	3	4	4	4	19
73	LK	1	4	4	4	4	4	20
74	LK	1	4	4	4	3	4	19
75	LK	1	4	4	4	4	4	20
76	LK	1	4	4	4	4	5	21
77	LK	1	4	4	4	4	4	20
78	LK	1	4	4	4	4	4	20
79	LK	1	4	4	4	4	4	20
80	LK	1	4	4	3	4	3	18
81	LK	1	4	4	4	4	5	21
82	LK	1	4	4	4	4	5	21
83	LK	1	4	4	4	3	5	20
84	LK	1	4	4	4	4	4	20
85	LK	1	4	4	4	4	4	20
86	LK	1	4	4	4	4	4	20
87	LK	1	5	5	5	5	5	25





LAMPIRAN 3

STATISTIK DESKRIPTIF

A. Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Faktur	87	34,00	50,00	41,5287	3,92914
E-SPT	87	30,00	50,00	41,9655	4,23015
Gender	87	,00	1,00	,5287	,50207
Kepatuhan PKP	87	16,00	25,00	21,1724	2,44572
Valid N (listwise)	87		וטטטו		

B. Statistik Deskriptif Pernyataan

1. E-Faktur

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
	Valid	87	NIVE87	SITA\$87	SLAM ⁸⁷	IEGE87	87	87	87	87	87
N	Missing	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,5977	3,9885	3,3908	4,3218	4,2644	4,0575	4,2874	4,2414	4,1839	4,1954
Sum		400,00	347,00	295,00	376,00	371,00	353,00	373,00	369,00	364,00	365,00
MAKASSAR											

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Setuju	35	40,2	40,2	40,2
Valid	Sangat Setuju	52	59,8	59,8	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak Setuju	5	5,7	5,7	5,7
	Ragu-Ragu	7	8,0	8,0	13,8
Valid	Setuju	59	67,8	67,8	81,6
	Sangat Setuju	16	18,4	18,4	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

X1.3

	And										
		Fr	requency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent					
						. 7011					
	Tidak Setuju		25	28,7	28,7	28,7					
	Ragu-Ragu		9	10,3	10,3	39,1					
						·					
Valid	Setuju		47	54,0	54,0	93,1					
	Sangat Setuju		6	6,9	6,9	100,0					
	Total		87	100,0	100,0						

X1 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative			
					Percent			
	Ragu-Ragu	UNIVER3	TAS 14,6	AM NEGE4,6	4,6			
Valid	Setuju	51	58,6	58,6	63,2			
vallu	Sangat Setuju	32	36,8	36,8	100,0			
	Total	87	100,0	100,0				
MAKASSAR								

X1.5

	XIII									
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative					
					Percent					
	Ragu-Ragu	4	4,6	4,6	4,6					
Valid	Setuju	56	64,4	64,4	69,0					
valid	Sangat Setuju	27	31,0	31,0	100,0					
	Total	87	100,0	100,0						

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative					
					Percent					
	Tidak Setuju	1	1,1	1,1	1,1					
	Ragu-Ragu	11	12,6	12,6	13,8					
Valid	Setuju	57	65,5	65,5	79,3					
	Sangat Setuju	18	20,7	20,7	100,0					
	Total	87	100,0	100,0						

X1.7

	Kib										
		Fr	requency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent					
	Ragu-Ragu		1	1,1	1,1	1,1					
Valid	Setuju		60	69,0	69,0	70,1					
Valid	Sangat Setuju		26	29,9	29,9	100,0					
	Total		87	100,0	100,0						

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
	Tidak Setuju	UNIVERSI	TAS 1911	AM NEGERI	1,1
	Ragu-Ragu	2	2,3	2,3	3,4
Valid	Setuju	59	67,8	67,8	71,3
	Sangat Setuju	25	28,7	28,7	100,0
	Total	M A 87	100,0	100,0	

X1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
\/al;d	Setuju	71	81,6	81,6	81,6
Valid	Sangat Setuju	16	18,4	18,4	100,0

Total	87	100,0	100,0	
1014	01	100,0	100,0	

X1.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
	Ragu-Ragu	1	1,1	1,1	1,1
Valid	Setuju	68	78,2	78,2	79,3
valiu	Sangat Setuju	18	20,7	20,7	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

2. E-SPT

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
N	Valid	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
N	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,5977	3,8851	3,4368	4,3793	4,2644	4,3448	4,1379	4,2759	4,1724	4,4713
Sum		400,00	338,00	299,00	381,00	371,00	378,00	360,00	372,00	363,00	389,00

X2.1

		Frequency UNIVERS	Percent TAS ISL/	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu Setuju	33	1,1 37,9	1,1 37,9	1,1 39,1
vallu	Sangat Setuju Total	M A 53 87	60,9 100,0	S A 60,9 100,0	100,0

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,1	1,1	1,1
valiu	Ragu-Ragu	23	26,4	26,4	27,6

Setuju	48	55,2	55,2	82,8
Sangat Setuju	15	17,2	17,2	100,0
Total	87	100,0	100,0	

X2.3

	AZ.3								
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative				
					Percent				
	Tidak Setuju	22	25,3	25,3	25,3				
	Ragu-Ragu	12	13,8	13,8	39,1				
Valid	Setuju	46	52,9	52,9	92,0				
	Sangat Setuju	7	8,0	8,0	100,0				
	Total	87	100,0	100,0					
			X2.4						

				AZ.4		
		F	requency	Percent	Valid Percent	Cumulative
						Percent
	Tidak Setuju		1	1,1	1,1	1,1
	Ragu-Ragu		1	1,1	1,1	2,3
Valid	Setuju		49	56,3	56,3	58,6
	Sangat Setuju		36	41,4	41,4	100,0
	Total		87	100,0	100,0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

-	X2.5								
	Cumulative								
				0 4 0	Percent				
	Ragu-Ragu	M A 6	6,9	6,9	6,9				
Valid	Setuju	52	59,8	59,8	66,7				
Valid	Sangat Setuju	29	33,3	33,3	100,0				
	Total	87	100,0	100,0					

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
	Ragu-Ragu	2	2,3	2,3	2,3
Valid	Setuju	53	60,9	60,9	63,2
vallu	Sangat Setuju	32	36,8	36,8	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

X2.7

		Frequenc	у	Percent	Valid Pe	ercent	Cumulative Percent
	Ragu-Ragu		3	3,4		3,4	3,4
Valid	Setuju		69	79,3		79,3	82,8
Valid	Sangat Setuju		15	17,2		17,2	100,0
	Total		87	100,0		100,0	

X2.8

		Frequency		Percent	Vali	id Percent	Cumulative Percent		
	Tidak Setuju		1	1,1		1,1		1,1	
	Ragu-Ragu		3	3,4		3,4		4,6	
Valid	Setuju		54	62,1		62,1		66,7	
	Sangat Setuju	UNIVEF	29	TAS 33,3/	AM P	IEGE33,3		100,0	
	Total		87	100,0		100,0			

X2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
	Ragu-Ragu	3	3,4	3,4	3,4
Volid	Setuju	66	75,9	75,9	79,3
Valid	Sangat Setuju	18	20,7	20,7	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

X2.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ragu-Ragu	6	6,9	6,9	6,9
	Setuju	34	39,1	39,1	46,0
Valid	Sangat Setuju	47	54,0	54,0	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

3. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Statistics

		Y1		1 2	Y3 🗆	Y4	Y5	
N	Valid	8	7	87	87	87	87	
	Missing		0	0	0	0	0	
Mean		4,229	9 4	1,2414	4,1034	4,0115	4,5862	
Sum		368,0	0 3	869,00	357,00	349,00	399,00	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative	
					Percent	
	Ragu-Ragu	5	5,7	5,7	5,7	
Valid	Setuju	UNIVER	SITA _{65,5} S	SLAM NF _{65,5}	TRI 71,3	
valiu	Sangat Setuju	25	28,7	28,7	100,0	
	Total	87	100,0	100,0		

M A K A S S A R											
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative						
					Percent						
	Ragu-Ragu	4	4,6	4,6	4,6						
امانما	Setuju	58	66,7	66,7	71,3						
Valid	Sangat Setuju	25	28,7	28,7	100,0						
	Total	87	100,0	100,0							

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak Setuju	5	5,7	5,7	5,7
	Ragu-Ragu	7	8,0	8,0	13,8
Valid	Setuju	49	56,3	56,3	70,1
	Sangat Setuju	26	29,9	29,9	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Y4

		Freq	uency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak Setuju		7	8,0	8,0	8,0
	Ragu-Ragu		8	9,2	9,2	17,2
Valid	Setuju		49	56,3	56,3	73,6
	Sangat Setuju		23	26,4	26,4	100,0
	Total		87	100,0	100,0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative		
					Percent		
	Ragu-Ragu	2	2,3	2,3	2,3		
.,	Setuju	32	36,8	36,8	39,1		
Valid	Sangat Setuju	53	60,9	60,9	100,0		
	Total	UNIVER	SITAS,0	LAM NEGE	RI		

4. Gender

Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
	Perempuan	41	47,1	47,1	47,1
Valid	Laki-Laki	46	52,9	52,9	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

LAMPIRAN 4

UJI KUALITAS DATA

A. Uji Validitas

1. E-Faktur

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	E-Faktur
	Pearson Correlation	1	,253*	,281**	,432**	,493**	,459**	,396**	,320**	,389**	,433**	,621**
X1.1	Sig. (2-tailed)		,018	,008	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,000	,000
	N	87	87	87	17 87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,253 [*]	1	,459**	,303**	,283**	,455**	,318**	,367**	,345**	,354**	,643**
X1.2	Sig. (2-tailed)	,018		,000	,004	,008	,000	,003	,000	,001	,001	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,281**	,459**	1	,276**	,375**	,405**	,327**	,276**	,327**	,371**	,673**
X1.3	Sig. (2-tailed)	,008	,000		,010	,000	,000	,002	,010	,002	,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,432**	,303**	,276**	1	,370**	,350**	,430**	,349**	,312**	,366**	,598**
X1.4	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,010		,000	,001	,000	,001	,003	,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,493**	,283**	,375**	,370**	1	,514**	,558**	,450**	,431**	,481 ^{**}	,703**
X1.5	Sig. (2-tailed)	,000	,008	R 5000	S ,000	AM N	G,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,459**	,455**	,405**	,350**	,514**	1	,690 ^{**}	,405**	,536**	,531**	,769**
X1.6	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,396**	,318**	,327**	,430**	,558**	,690 ^{**}	1	,440**	,647**	,574**	,745**
X1.7	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,002	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,320**	,367**	,276**	,349**	,450**	,405**	,440**	1	,551 ^{**}	,590**	,662**
X1.8	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,010	,001	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
X1.9	Pearson Correlation	,389**	,345**	,327**	,312**	,431**	,536**	,647**	,551**	1	,760**	,718 ^{**}
۸۱.۶	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,002	,003	,000	,000	,000	,000		,000	,000

	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,433**	,354**	,371**	,366**	,481**	,531**	,574**	,590**	,760**	1	,749**
X1.10	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,621**	,643**	,673**	,598**	,703**	,769**	,745**	,662**	,718 ^{**}	,749**	1
E-Faktur	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

 $^{^{\}star}$. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. E-SPT

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	E-SPT
	Pearson Correlation	1	,522**	,429**	,559**	,437**	,518**	,353**	,411**	,342**	,342**	,686**
X2.1	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,001	,001	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,522**	1	,533**	,346**	,426**	,497**	,556**	,397**	,573**	,424**	,752**
X2.2	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,429**	,533**	1	,391**	,458**	,482**	,437**	,466**	,378**	,253 [*]	,730**
X2.3	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,018	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,559**	,346**	,391**	1	,672**	,602**	,392**	,515 ^{**}	,319**	,337**	,712**
X2.4	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	AS ISI	A,000	EG,000	,000	,000	,003	,001	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,437**	,426**	,458**	,672**	1	,576**	,590**	,503**	,392**	,390**	,757**
X2.5	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	87	87	87	A 87	87	A 87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,518 ^{**}	,497**	,482**	,602**	,576 ^{**}	1	,349**	,445**	,327**	,385**	,729**
X2.6	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,001	,000	,002	,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,353**	,556**	,437**	,392**	,590**	,349**	1	,579**	,688**	,356**	,721**
X2.7	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000	,001		,000	,000	,001	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,411**	,397**	,466**	,515 ^{**}	,503**	,445**	,579**	1	,553**	,308**	,719**
X2.8	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,004	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	Pearson Correlation	,342**	,573**	,378**	,319**	,392**	,327**	,688**	,553**	1	,479 ^{**}	,686**
X2.9	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,003	,000	,002	,000	,000		,000	,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,342**	,424**	,253 [*]	,337**	,390**	,385**	,356**	,308**	,479**	1	,595**
X2.10	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,018	,001	,000	,000	,001	,004	,000		,000
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,686 ^{**}	,752**	,730**	,712 ^{**}	,757**	,729**	,721 ^{**}	,719**	,686**	,595**	1
E-SPT	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak



Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Kepatuhan PKP
	Pearson Correlation	1	,737**	,548**	,433**	,328**	,775**
Y1	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,002	,000
	N	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,737**	1	,590	,446	,232 [*]	,770**
Y2	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,031	,000
	N	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,548**	,590**	1	,738**	,214 [*]	,864 ^{**}
Y3	Sig. (2-tailed)	,000	,000	NEO	,000	,047	,000
	N UNIVERS	87	87	87	EK 87	87	87
	Pearson Correlation	,433	,446	,738**	1	,245 [*]	,820 ^{**}
Y4	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,022	,000
	N	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,328**	,232 [*]	,214 [*]	,245 [*]	1	,495 ^{**}
Y5	Sig. (2-tailed)	,002	,031	,047	,022		,000
	N	87	87	87	87	87	87
	Pearson Correlation	,775**	,770**	,864**	,820**	,495**	1
Kepatuhan PKP	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	87	87	87	87	87	87

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Uji Realibilitas

1. E-Faktur

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,855	10

2. E-SPT

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	4
,879	10)



3. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,799	5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAKASSAR

LAMPIRAN 5

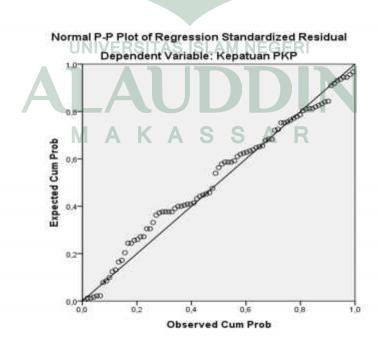
UJI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One Campion		J : : : :		_
			Unstandardize	ed
			Residual	
N				87
Normal Parameters ^{a,b}		ean	,00000	00
		d. Deviation	1, <mark>75</mark> 6875	44
	Ab	osolute	,0,	96
Most Extreme Differences	Po	ositive	,00	60
	Ne	egative	-,0	96
Kolmogorov-Smirnov Z			,89	93
Asymp. Sig. (2-tailed)			,40	03

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.



B. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Mode		Collinearity Statistics				
		Tolerance	VIF			
	E-Faktur	,345	2,898			
1	E-SPT	,344	2,905			
	Gender	,950	1,053			

a. Dependent Variable: Kepatuan PKP

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the	Durbin-Watson
			Square	Estimate	
1	,696 ^a	,484	,465	1,78834	2,098

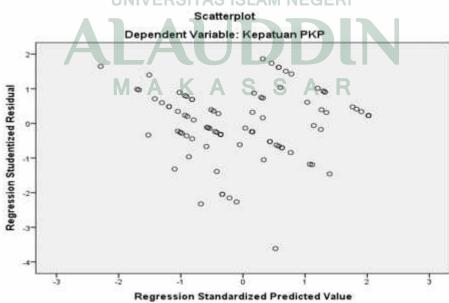
a. Predictors: (Constant), Gender, E-Faktur, E-SPT

b. Dependent Variable: Kepatuan PKP

C. Uji Heteroskedastisitas

1. Grafik Scatterplot

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



2. Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardize	ed Coefficients	Standardized	t	Sig.
				Coefficients		
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1,977	1,303		1,517	,133
1	E-Faktur	-,047	,052	-,166	-,908	,366
	E-SPT	,036	-,048	,139	,759	,450
	Gender	-,392	,243	-,177	-1,610	,111

a. Dependent Variable: AbsUt

D. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,28309
Cases < Test Value	43
Cases >= Test Value	
Total Cases	87
Number of Runs	M A 47
Z	,541
Asymp. Sig. (2-tailed)	,589



LAMPIRAN 6

UJI HIPOTESIS

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Model Summary

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Model	R	R Square Adjusted R		Std. Error of the	
			Square	Estimate	
1	,693 ^a	,480	,468	1,78397	

a. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Faktur

ANOVA

Model		Sum c	f Squares	df		Me	an Square	F	Sig.
	Regression		247,079		2		123,539	38,818	,000 ^b
1	Residual		267,335		84		3,183		
	Total		514,414		86				

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP

b. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Faktur

UNIVERSCoefficients^aAM NEGERI

Model		Unstandardize	ed Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3,019	A 2,096	SAR	1,441	,153
1	E-Faktur	,182	,081	,292	2,232	,028
	E-SPT	,253	,076	,437	3,338	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP

B. Analisis Regresi Moderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the	
			Square	Estimate	
1	,804 ^a	,646	,624	1,49996	

a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore: Gender, Zscore: E-Faktur,

X1_M, Zscore: E-SPT

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	332,174	<u>1</u>	66,435	29,528	,000 ^b
1	Residual	182,240	81	2,250		
	Total	514,414	86			

a. Dependent Variable: Kepatuan PKP

b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore: Gender, Zscore: E-Faktur, X1_M, Zscore: E-SPT

Coefficients^a

Model		Unstandardize	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
				Coefficients		
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	JNIVE _{19,442}	AS ISLA ₃₂₇ 1	NEGERI	59,478	,000
1	Zscore: E-Faktur	,778	,276	,318	2,821	,006
	Zscore: E-SPT		,279	,467	4,088	,000
	Zscore: Gender	-,259	,169	-,106	-1,535	,129
	X1_M	,725	,358	,213	2,026	,046
	X2_M	,713	,340	,222	2,098	,039

a. Dependent Variable: Kepatuan PKP

RIWAYAT HIDUP



MUH. AKBAR AMIN, dilahirkan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Juni 1995. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, buah hati dari Ayahanda Ir. H. Muh. Amin dan Ibunda Hj. Nurbaya Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan

pendidikan ke SD Negeri 3 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tahun 2001 hingga tahun 2007, lalu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tahun 2007 hingga 2010. Pada tahun tersebut penulis juga melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK Negeri 1 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hingga tahun 2013, lalu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

MAKASSAR

Contact Person:

Email: muhakbaramin21@gmail.com

No. Hp: 085 343 522 100